

**RENCANA KERJA
(RENJA)
TAHUN 2026**



**DINAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN BOGOR TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Mengacu pada Peraturan Bupati Bogor Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan Peraturan Bupati Bogor Nomor 24 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026, maka Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor menyusun dokumen Rencana Kerja tahun 2026 sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dokumen Rencana Kerja tahun 2026 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban formal atas semua pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2026 yang dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029. Dokumen ini menyajikan target dan capaian kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor tahun 2026 dan analisisnya. Walaupun masih banyak kekurangan dalam penyusunan dokumen ini, kami berharap dokumen ini dapat digunakan sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, serta optimalisasi peran dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga secara keseluruhan dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Bogor.

Kepala Dinas,



ENTIS SUTISNA, S.Pd, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196710041992121001



**BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 24 TAHUN 2025**

TENTANG

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menjamin terciptanya sinkronisasi antara rencana kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dengan perencanaan pembangunan Daerah tahun 2026, Perangkat Daerah di Kabupaten Bogor berkewajiban menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2026;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

8. Undang-Undang ...

8. Undang-Undang Nomor 102 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7039);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
11. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangcrang, Bekasi, Puncak dan Cianjur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 101);
12. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

15. Peraturan ...

15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

22. Peraturan ...

22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6533);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
30. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 361);

31. Peraturan ...

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 119);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 128);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 129);
37. Peraturan Bupati Bogor Nomor 20 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2026.

BAB I ...

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah Daerah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
5. Bupati adalah Bupati Bogor.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
8. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Bappedalitbang adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor.
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala Bappedalitbang adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor.

10. Desa ...

10. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bogor yang selanjutnya disebut dengan RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Bogor untuk periode 20 (dua puluh) tahunan.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD Kabupaten Bogor adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Bogor untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut dengan RKPD Provinsi adalah dokumen perencanaan Provinsi Jawa Barat yang untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
21. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
22. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
23. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
24. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD;
25. Program Strategis Nasional adalah program yang ditetapkan Presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
26. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan Daerah.
27. Informasi Pembangunan Daerah adalah sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, serta analisis dan profil pembangunan Daerah.
28. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.

29. Kegiatan ...

29. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
30. Sub Kegiatan adalah bagian dari kegiatan yang bersifat detail dan dilaksanakan untuk menghasilkan output langsung.

BAB II

KEDUDUKAN DAN MUATAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Kedudukan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Pasal 2

- (1) Renja PD Tahun 2026 merupakan pedoman rencana Perangkat Daerah sesuai kewenangan bidang urusan/unsur, tanggung jawab dan fungsi.
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari Renstra PD Tahun 2025-2029.
- (3) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029.
- (4) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RKPD Kabupaten Bogor Tahun 2026.
- (5) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinput dalam SIPD.
- (6) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan KUA/PPAS, RKA SKPD dan RAPBD Tahun Anggaran 2026.
- (7) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar dalam penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan Perangkat Daerah.

Bagian ...

Bagian Kedua

Muatan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Pasal 3

Renja PD Tahun 2026 sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2, memuat:

- a. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
- b. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai dengan indikator dan target kinerja serta pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah;
- c. pendanaan dan sumber pendanaan; dan
- d. dukungan terhadap prioritas nasional, Jawa Barat dan Kabupaten Bogor.

Pasal 4

Isi beserta uraian Renja PD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I sampai dengan LXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

**SINKRONISASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN TAHUN 2026**

Pasal 5

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Renja PD Tahun 2026 memedomani Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam RKPD Tahun 2026, serta Renstra PD Tahun 2025-2029 untuk tahun 2026.

BAB IV

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

- (1) Renja PD Tahun 2026 dapat dilakukan perubahan dalam hal:
 - a. terjadi perubahan kebijakan nasional terkait kewenangan bidang urusan;
 - b. terjadi perubahan nomenklatur Perangkat Daerah/ kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah;
 - c. terjadi ...

- c. terjadi perubahan pada rincian belanja yang mendukung pencapaian target kinerja; dan
 - d. terjadi perubahan Renstra PD;
- (2) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terakomodir dalam Perubahan RKPD Tahun 2026.

Pasal 7

Perubahan Renja PD disusun dengan tahapan:

- a. penyusunan rancangan perubahan Renja PD Tahun 2026;
- b. perumusan rancangan akhir perubahan Renja PD Tahun 2026; dan
- c. penetapan perubahan Renja PD Tahun 2026.

Pasal 8

- (1) Perubahan Renja PD ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD Tahun 2026 ditetapkan.
- (2) Peraturan Bupati tentang Perubahan Renja PD Tahun 2026 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan RKA SKPD;
- (3) Isi perubahan Renja PD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam SIPD.

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan penyusunan Renja PD Tahun 2026 dan Perubahan Renja PD Tahun 2026.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan kepada Kepala Bappedalitbang.
- (3) Kepala Bappedalitbang melakukan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan penyusunan Renja PD Tahun 2026 dan Perubahan Renja PD Tahun 2026.

(4) Kepala ...

- (4) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD Tahun 2026 dan Perubahan Renja PD Tahun 2026.
- (5) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan triwulanan hasil pemantauan dan supervisi kepada Bupati melalui Kepala Bappedalitbang.
- (6) Kepala Bappedalitbang melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan supervisi pelaksanaan Renja PD Tahun 2026 dan Perubahan Renja PD Tahun 2026 setiap triwulan dalam tahun anggaran berjalan.
- (7) Hasil evaluasi Renja PD Tahun 2026 dan Perubahan Renja PD Tahun 2026 menjadi bahan bagi penyusunan Renja PD untuk tahun berikutnya.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 7 Agustus 2025



Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 7 Agustus 2025



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

WJAT ROCHMAT JANNIKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2025 NOMOR 24

LAMPIRAN XXV PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR : 24 TAHUN 2025

TANGGAL : 7 AGUSTUS 2025

TENTANG : RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BOGOR TAHUN 2026

**RENCANA KERJA DINAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN BOGOR TAHUN 2026**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

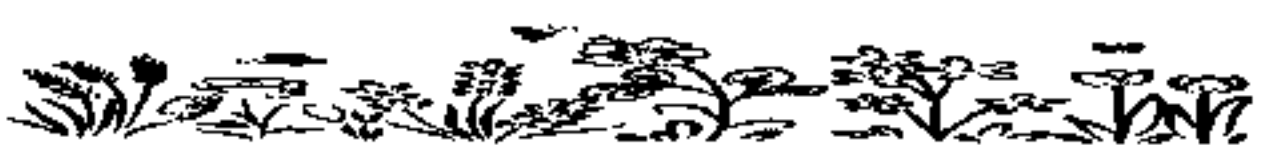
Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan adalah dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tahun 2026 disusun secara simultan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam substansi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026. Di samping itu, Renja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan tahun 2026 menjadi bagian dari tahapan "fondasi" periode perencanaan jangka menengah tahun 2025-2029, yang telah dipertimbangkan dalam proses penyusunan Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tahun 2025-2029. Oleh karena itu, substansi Renja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan tahun 2026 telah memedomani tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi, serta program-program yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, serta tujuan dan sasaran daerah, yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pendidikan.

Renja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dengan tahapan:

1. Persiapan Penyusunan Renja;
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja;
3. Penyusunan Rancangan Renja;
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
5. Perumusan Rancangan Akhir Renja, dan

6. Penetapan Renja

khususnya dalam tahap kelima, perumusan Rancangan Akhir Renja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan disinkronisasikan dengan substansi yang dirumuskan dalam Rancangan Akhir Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.



Rencana Kerja (Renja) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahun 2026 yang wajib disusun untuk menjabarkan Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan tahun 2025-2029 sebagaimana Peraturan Bupati Bogor Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029. Renja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Tahun 2026 telah berpedoman pada substansi RKPD Kabupaten Bogor Tahun 2026, yang merupakan dokumen perencanaan tahun kedua pada periode perencanaan jangka panjang tahun 2025-2045 dan periode perencanaan jangka menengah tahun 2025-2029.

Penyusunan Renja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan tahun 2026 dilakukan secara simultan dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bogor tahun 2026, yang bersinergi dengan kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Jawa Barat dan memuat program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, lokasi, target capaian kinerja dan pendanaan, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, serta tercantum dalam SIPD-RI. Untuk menjamin kesinambungan dan konsistensi dalam proses perencanaan, substansi dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 akan menjadi bagian dari RPJMD Tahun 2025-2029. Disamping itu, Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 akan menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen penganggaran, mulai dari tahapan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran dinas, hingga RKA Tahun 2026, serta menjadi pedoman dalam penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Hal ini seiring dengan berakhirnya periode perencanaan jangka menengah Kabupaten Bogor tahun 2025-2029. Oleh karena itu, perangkat daerah juga diwajibkan menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang memedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. Selanjutnya, Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan akan menjadi pedoman dalam



penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan untuk tahun 2025-2029.

Dalam pelaksanaannya, penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan dilakukan secara simultan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 Kabupaten Bogor dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, sebagai bentuk sinkronisasi substansi yang bermuara pada keterhubungan antara pencapaian target kinerja utama daerah dengan target kinerja utama perangkat daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 ketentuan Pasal 1 Nomor 30 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran. Adapun Renja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.

Renja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan untuk periode tahun 2026 yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, lokasi, target capaian kinerja dan pendanaan, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan sebagai penjabaran dari urusan pilihan yang berkaitan dengan bidang urusan pertanian maupun sub urusan yang telah ditetapkan. Renja ini disusun dengan tetap mempedomani Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bogor Tahun 2026.



Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah turut dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang tidak terpisahkan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2026. Dokumen perencanaan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (3) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Serta sebagaimana dalam Pasal 13 ayat (2) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Renja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

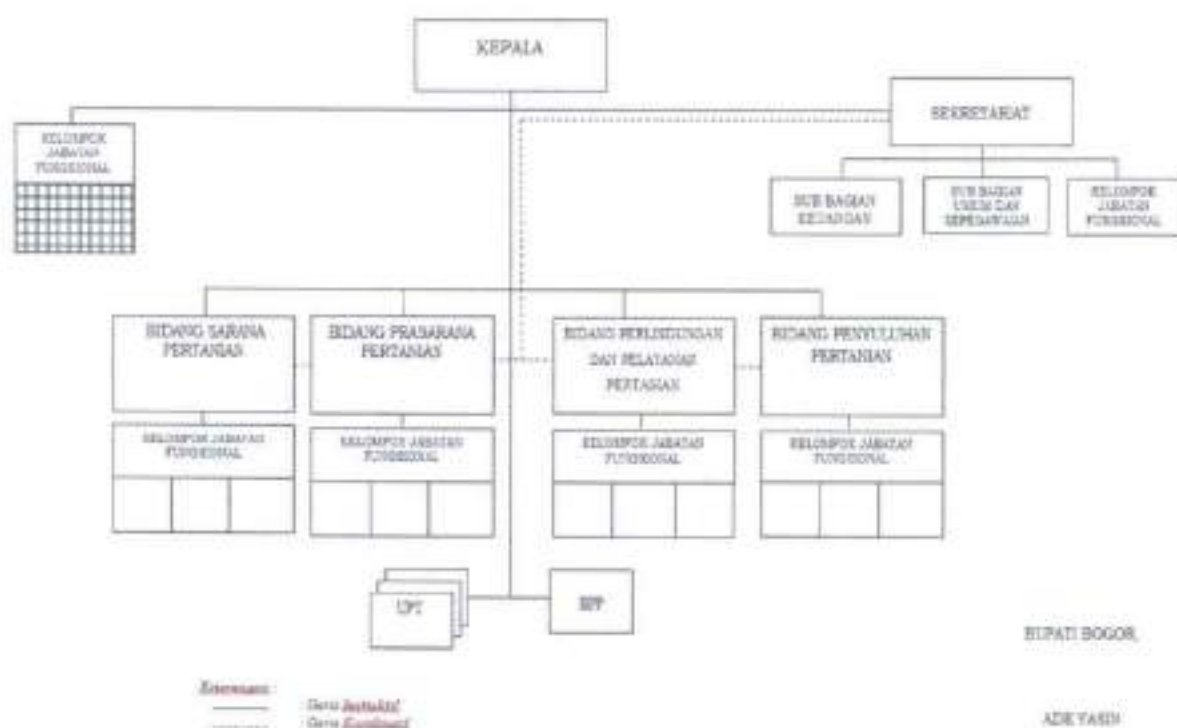
Dalam menyusun Renja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor Tahun 2026 berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah. Selain berpedoman pada Renstra, juga berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan yang bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Dalam penyempurnaan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah akan dilaksanakan Forum Perangkat Daerah Kabupaten Bogor yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor. Hasil dari Forum Perangkat Daerah merumuskan usulan-usulan untuk menyempurnakan Rancangan Akhir Renja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan



Tahun Anggaran 2026. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan mendukung tujuan daerah yang kedua yaitu **“Meningkatnya Produktivitas Ekonomi Daerah”** yang dijabarkan dengan sasaran daerah yaitu **“Meningkatnya Ketahanan Pangan”**. Dalam menentukan kebutuhan anggaran dan program prioritas serta batas maksimal anggaran yang dianggarkan dalam Renja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor Tahun 2026 telah berpedoman pada RKPD 2026.

Bahwa Renja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor tahun 2026 telah terintegrasi dengan RKPD, dan telah mengacu pada Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor 2025-2029 serta RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029, juga telah sesuai prioritas pembangunan **Provinsi Jawa Barat** yang terkait yaitu : **“Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan, serta Pengembangan Pariwisata”** dan **“Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah”** serta sesuai dengan prioritas pembangunan nasional yang terkait yaitu : **“Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan”** dan **“Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”**. Selain itu dalam penentuan anggarannya telah sinkron dengan RKPD Kabupaten Bogor 2026. Dalam renja turut mengakomodir kondisi dan kebijakan nasional termasuk dengan adanya penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang berdampak terhadap perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor. Hal ini dituangkan dalam Peraturan Bupati Bogor Nomor 130 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan dengan bagan struktur organisasi yang baru sebagai berikut :



1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Tahun 2026 adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 Ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8), sebagaimana telah diubah Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);



3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
15. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
16. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
17. Undang-Undang Nomor Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);



19. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);



27. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
29. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
30. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);



36. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur;
37. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
38. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
39. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
40. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
41. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40/Permentan/OT.010/08/2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan dan Bidang Pertanian;
42. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/OT.010/08/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);



44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Review Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Tahun 461);
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah;
50. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamakan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
51. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
52. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 259/Kpts/RC.020/M/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024.



53. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
54. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
55. Instruksi Menteri Dalam Negeri Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023;
56. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
57. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E);
58. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
59. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Nomor 9 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
60. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 86 Tahun 2014 tentang Kebijakan transisional Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pelayanan Publik;



61. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022);
62. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembar Daerah Nomor 236);
63. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 95, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 95);
64. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);
65. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 2);
66. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025 Nomor 4);
67. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);
68. Peraturan Bupati Bogor Nomor 57 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengembangan Teknologi dan Peredaran Hasil pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor;



69. Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kebijakan Transisional Pemerintah Kabupaten Bogor setelah Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
70. Peraturan Bupati Bogor Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 62).
71. Peraturan Bupati Bogor Nomor 130 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
72. Peraturan Bupati Bogor Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029.
73. Peraturan Bupati Bogor Nomor 24 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja ini yaitu sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran dalam rangka penyusunan bahan RAPBD tahun 2026.

Adapun tujuan disusunnya Renja ini yaitu :

1. Menjadi panduan bagi perangkat daerah dalam merumuskan target kinerja perangkat daerah yang mendukung pencapaian target kinerja daerah tahun 2026;
2. Memberikan informasi publik terkait rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah pada tahun 2026;
3. Menjadi panduan bagi perangkat daerah dalam menyusun rincian belanja dalam tahapan KUA-PPAS, RKA dan RAPBD tahun 2026.



1.4 Sistematika Penulisan

Sebagai acuan, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sistematika penulisan renja SKPD adalah sebagai berikut :

- I. Pendahuluan
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Landasan Hukum
 - 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.4 Sistematika Penulisan
- II. Hasil Evaluasi Renja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Tahun 2024
 - 2.1 Capaian Kinerja Renja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Tahun 2024
 - 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
 - 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
 - 2.4 Review Terhadap RKPD
 - 2.5 Penelaahan Usulan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
- III. Tujuan dan Sasaran Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
 - 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
 - 3.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
 - 3.3 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
- IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
- V. Penutup



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN TAHUN 2024

2.1 Capaian Kinerja Renja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Tahun 2024

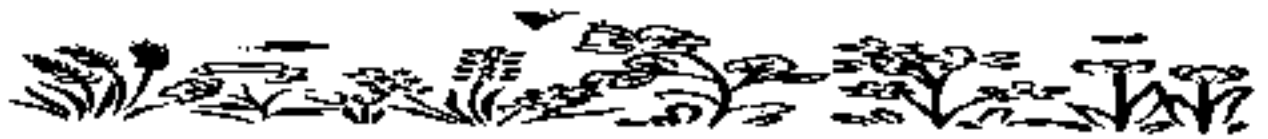
Pada tahun 2024 telah dilaksanakan 6 program dan 15 kegiatan serta 52 sub kegiatan dalam Perubahan Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Tahun 2024 dengan pagu belanja total sebesar Rp. 68.846.590.401,- yang terdiri dari pagu belanja operasi sebesar Rp. 62.864.297.023,- dan pagu belanja modal sebesar Rp. 5.982.293.378,- termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp 520.000.000,-. Adapun komponen pagu anggaran belanja operasi tersebut terdiri atas Belanja Pegawai sebesar Rp 35.102.740.709,- dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 27.761.556.314,-. Adapun realisasi anggaran sampai dengan Triwulan IV tahun 2024 sebesar Rp 67.610.883.851,- yaitu 98,21%, dari total pagu. Berdasarkan realisasi capaian fisik, hampir seluruh kegiatan sudah dilaksanakan dengan capaian fisik kegiatan mencapai 100%.

Tingkat capaian kinerja tujuan, sasaran, dan program Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan pada tahun 2024 sebagian besar telah melebihi target yang ditetapkan dan ditunjukkan pada tabel sebagai berikut :



Tabel. Tingkat Capaian Kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor Tahun 2024

No	Tujuan, Sasaran, dan Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
Tujuan :					
1	Meningkatnya produk pertanian	Jumlah produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	748.135 Ton	802.441 Ton	107,26
Sasaran :					
1	Meningkatnya produktivitas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	Produktivitas pertanian per hektar	6,74 Ton/Ha	6,46 Ton/Ha	95,85
Program :					
1	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase sarana pertanian yang dapat dimanfaatkan	11,94%	14,15%	118,51%
2	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana pertanian yang dapat dimanfaatkan	22,22%	22,22%	100,00%
3	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase luas lahan pertanian yang diasuransikan untuk meminimalkan risiko bencana pertanian	26,69%	26,69%	100,00%
4	Perizinan Usaha Pertanian	Persentase pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan pelayanan pertimbangan teknis izin usaha pertanian	32,10%	32,10%	100,00%



5	Penyuluhan Pertanian	Persentase SDM pertanian yang meningkat kompetensinya	1,78%	1,87%	105,06%
6	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai AKIP Perangkat Daerah	74,45	74,45	100,00%

Berdasarkan tabel di atas, maka berbagai upaya yang akan dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan pada tahun 2026 dalam rangka mengatasi target kinerja yang tidak tercapai antara lain :

1. Meningkatkan penerapan teknologi pertanian dan bimbingan teknis budidaya tanaman secara berkelanjutan sesuai penerapan SOP/GAP/GHP;
2. Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan gangguan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) melalui gerakan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) secara masif dan berkelanjutan;
3. Menerapkan pembangunan pertanian yang berbasis kawasan Berkelanjutan (LP2B) kepada masyarakat);
4. Meningkatkan penerapan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) guna menekan resiko bencana pertanian;
5. Meningkatkan kebijakan yang mendukung pengembangan penyuluh pertanian dan petani millennial;
6. Optimalisasi tugas pokok dan fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan beserta aparaturnya melalui standar operasional kegiatan sebagai regulator dan fasilitator masyarakat pertanian dalam pengembangan pertanian;
7. Meningkatkan keakuratan data statistik dalam pengelolaan pertanian.



Sejalan dengan tujuan kedua pemerintah Kabupaten Bogor yaitu **“Meningkatnya Produktivitas Ekonomi Daerah”** yang dijabarkan dengan sasaran daerah yaitu **“Meningkatnya Ketahanan Pangan”** yang sangat berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan dimana hal tersebut merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Bogor dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang tinggi dan merata, peningkatan daya saing dan pelayanan publik yang berkualitas. Adapun rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja dan pencapaian renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan sampai dengan tahun 2024 ditunjukkan oleh Tabel 2.1 terlampir.

Salah satu program strategis daerah yang merupakan program prioritas Bupati terkait Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yaitu **“Mandiri Penyediaan Benih Padi Unggul Bersertifikat”**. Seluruh program strategis ini diimplimentasikan ke dalam tahapan perencanaan tahunan dengan visi Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029 yaitu **“Kabupaten Bogor Istimewa dan Gemilang”**. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor mendukung Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Maju, yang merupakan tekad dan keinginan Bupati Bogor untuk menjadikan Kabupaten Bogor maju dalam hal perekonomian daerah serta tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka optimalisasi layanan publik, penciptaan iklim investasi yang nyaman dalam rangka perluasan lapangan kerja, penanggulangan masalah pengangguran dan kemiskinan melalui pengembangan permodalan dan pemasaran bagi wirausaha baru, UMKM serta pemberdayaan petani. Hal ini selaras dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, serta tugas pembantuan.



2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

Capaian target kinerja pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan pada tahun 2024 ditentukan dalam tiga Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tabel sebagai berikut :

Tabel. Tingkat Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1	Meningkatnya produk pertanian	Jumlah produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	748.135 Ton	802.441 Ton	107,26
2	Meningkatnya produktivitas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	Produktivitas pertanian per hektar	6,74 Ton/Ha	6,46 Ton/Ha	95,85

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target kinerja antara lain :

- 1) Produksi pertanian Kabupaten Bogor melebihi target. Produksi adalah jumlah output atau hasil panen dari luas lahan tertentu selama satu kali musim tanam yang diukur dalam satuan ton. Peningkatan produksi pertanian dapat memberikan daya dukung yang baik bagi tingkat kesejahteraan petani maupun ketersediaan pangan masyarakat. Pada tahun 2024, produksi pertanian Kabupaten Bogor yaitu sebesar 802.441 ton dari target sebesar 748.135 ton, hal ini ditandai dengan tingkat capaian kinerja sebesar 107,26%. Pencapaian yang melebihi target tersebut atas adanya dukungan dari program dan kegiatan dari APBD maupun APBN tahun anggaran 2024, antara lain Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian, Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota,



Pengembangan Prasarana Pertanian, Pembangunan Prasarana Pertanian, Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota, Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian, Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian, Fasilitasi Pupuk dan Pesticida, dan Fasilitasi Pembiayaan Pertanian (Asuransi Pertanian).

- 2) Produktivitas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan adalah produksi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan per satuan luas lahan yang digunakan dalam berusaha di bidang pertanian dengan satuan ton/ha. Pada tahun 2024, produktivitas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan Kabupaten Bogor hampir mencapai target. Target yang ditetapkan sebesar 6,74 ton/ha dengan realisasi sebesar 6,46 ton/ha, hal ini ditandai dengan tingkat capaian kinerja sebesar 95,85%. Pencapaian yang melebihi target tersebut atas adanya dukungan dari program dan kegiatan dari APBD maupun APBN tahun anggaran 2024, antara lain Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian, Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota, Pengembangan Prasarana Pertanian, Pembangunan Prasarana Pertanian, Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota, Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tanaman Pangan, Pengelolaan Produksi Tanaman Sereal/Tanaman Pangan, Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan, Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian, Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian, Fasilitasi Pupuk dan Pesticida, dan Fasilitasi Pembiayaan Pertanian (Asuransi Pertanian).

Adapun uraian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor dari tahun 2025 hingga tahun 2029 ditunjukkan pada Tabel 2.3 terlampir.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

Tingkat kinerja pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor dinilai sangat baik, hal tersebut dilihat



dari rata-rata capaian indikator kinerja pelayanan yang berhasil diraih yaitu sebesar 101,55% dari target yang telah ditetapkan.

Dalam pencapaian indikator kinerja pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan dalam sektor pertanian tentunya sangat dipengaruhi juga oleh ketersediaan lahan. Adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi suatu tantangan yang cukup besar. Pada tahun 2019 telah dilakukan pembahasan untuk membuat Peraturan Daerah yang dapat melindungi lahan pertanian, sehingga lahan pertanian pangan berkelanjutan dapat terwujud.

Ketersediaan air dan kesuburan tanah pada lahan pertanian juga sangat penting, kondisi saat ini cuaca dan iklim tidak dapat diprediksi sehingga membutuhkan penerapan teknologi pertanian dan upaya untuk menambah pasokan air, antara lain melalui pembangunan infrastruktur seperti jaringan irigasi, embung ataupun dam parit serta teknologi lain yang memungkinkan. Permasalahan ketersediaan air ini tentunya perlu disinergikan dengan kebijakan pemerintah provinsi dan pusat.

Untuk mengurangi dampak perubahan iklim terhadap kekurangan dan terjadi gagal panen, petani juga didorong untuk ikut dalam Asuransi Usaha Tani Pertanian (AUTP). Asuransi ini untuk mendorong kesejahteraan petani melalui perlindungan terhadap risiko kerugian nilai ekonomi usaha tani yang disebabkan karena gagal panen akibat banjir, kekeringan, maupun serangan hama.

Selain itu, belum optimalnya pembinaan, pengembangan, dan kerjasama kemitraan di sektor pertanian juga menentukan keberhasilan program dan kegiatan Dinas, dimana sampai dengan saat ini masih rendahnya pengetahuan dan kemampuan petani dalam menerapkan teknologi pertanian yang baik, menurunnya minat generasi muda terhadap sektor pertanian, keterbatasan akses pemasaran petani, serta kurangnya permodalan petani. Sejauh ini, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan telah memfasilitasi petani untuk mengembangkan pemasaran melalui berbagai pameran baik ditingkat lokal, nasional, dan internasional. Untuk tingkat Internasional, dinas membuka akses pemasaran kopi bogor, ini menjadi peluang besar bagi



petani bogor untuk semakin mengenalkan produk lokal bogor dan meningkatkan pemasarannya. Di samping itu, pembinaan yang dilaksanakan secara kontinyu oleh penyuluh pertanian dan petugas lapangan lainnya tentunya membantu petani dalam mengelola lahan pertanian. Perumusan isu-isu strategis didasarkan analisis terhadap permasalahan pelayanan yang mempengaruhi pelayanan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, antara lain yaitu Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

Selain itu, perumusan isu-isu strategis juga didasarkan pada analisa kondisi lingkungan eksternal (peluang dan ancaman), serta memperhatikan kondisi internal (kekuatan dan kelemahan) pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Pencermatan lingkungan internal dan eksternal, kesimpulan analisis faktor internal dan eksternal, serta matriks SWOT untuk menentukan alternatif strategi.

Isu-isu strategis berdasarkan kesimpulan analisis faktor internal dan eksternal akan menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun yang akan datang agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Isu strategis yang diperoleh yaitu :

1. Strategi S-O

- a. Pengembangan komoditas unggulan yang berpeluang pasar tinggi menjadi sentra agribisnis pada areal potensi pertanian;
- b. Peningkatan kualitas hasil olahan produk pertanian yang memiliki peluang pasar tinggi;
- c. Optimalisasi pengembangan sentra agribisnis dengan memanfaatkan hasil penelitian dan tenaga ahli dari perguruan tinggi dan lembaga penelitian;
- d. Optimalisasi penerapan peraturan perundang-undangan dalam mengembangkan pertanian dengan memperhatikan kaidah konservasi;



- e. Optimalisasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan beserta aparaturnya sebagai regulator dan fasilitator masyarakat pertanian;
 - f. Optimalisasi kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan pertanian.
2. Strategi W-O
 - a. Meningkatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dalam pengembangan pertanian;
 - b. Meningkatkan keakuratan data dalam pengelolaan pertanian;
 - c. Meningkatkan kapasitas aparatur dan mekanisme kerja melalui standar operasional kegiatan.
 3. Strategi S-T
 - a. Optimalisasi pengembangan komoditas unggulan menjadi sentra agribisnis;
 - b. Optimalisasi peraturan perundangan yang ada untuk mengatur penggunaan lahan dan pencegahan alih fungsi lahan;
 - c. Optimalisasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dalam pengelolaan potensi pertanian;
 - d. Optimalisasi sumber daya pemerintah daerah untuk meningkatkan produksi dan pengelolaan pertanian.
 4. Strategi W-T
 - a. Optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk peningkatan produksi dan pengelolaan pertanian;
 - b. Pemantapan data sebagai dasar pengelolaan pertanian dan kehutanan.

Berdasarkan hasil review faktor-faktor pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang meliputi : analisa renstra Kementerian Pertanian Republik Indonesia, analisa renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, dan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, analisa Rencana Tata Ruang Wilayah dan analisa KLHS, maka dapat ditentukan isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas



Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor sebagai berikut :

1. Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
2. Peningkatan kualitas dan kontinuitas produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dalam menghadapi persaingan pasar global;
3. Pencegahan dan Penanggulangan Gangguan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) maupun Dampak Penanggulangan Iklim (DPI);
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas ketersediaan infrastruktur, sarana prasarana, lahan, dan air;
5. Peningkatan penerapan teknologi pertanian yang ramah lingkungan;
6. Peningkatan akses pasar dan permodalan bagi petani;
7. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia pertanian;
8. Penguatan dan pemberdayaan kelembagaan petani dan penyuluhan;
9. Pengendalian dan pencegahan alih fungsi lahan pertanian;
10. Peningkatan akses pemasaran hasil pertanian;
11. Penurunan tingkat kehilangan hasil pertanian;
12. Pelayanan ijin usaha pertanian.

2.4 Review Terhadap RKPD

Jumlah anggaran Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan dalam dokumen RKPD Kabupaten Bogor Tahun 2026 telah sesuai dengan jumlah anggaran dalam dokumen renja tahun 2026 yang telah disesuaikan dengan kebutuhan dinas yaitu sebesar Rp. 99.083.005.016,- yang terdiri dari 6 program, 15 kegiatan, dan 71 sub kegiatan sesuai dengan dokumen RKPD. Adapun nomenklatur program antara RKPD dengan renja masih tidak ada perubahan, akan tetapi terdapat perubahan pada sasaran dan indikator program, sasaran dan indikator kegiatan, serta rincian sub kegiatan baik pada indikator sub kegiatan maupun target kinerja.

Analisis kebutuhan sebagaimana diatas merupakan hasil sinkronisasi perumusan program dan kegiatan perangkat daerah dalam

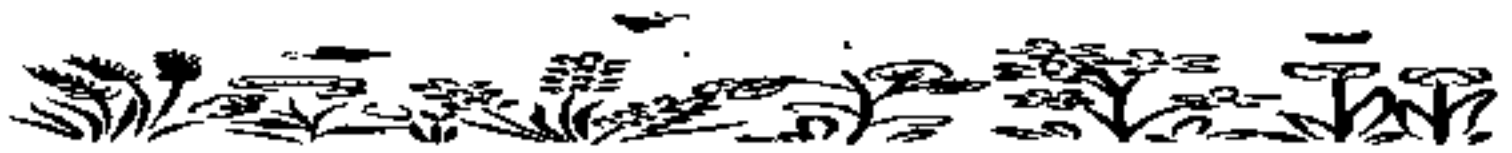


pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah untuk menajamkan usulan prioritas program dan kegiatan pembangunan tahun 2026. Adapun uraian program/kegiatan/sub kegiatan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan terhadap RKPD tahun 2026 Kabupaten Bogor ditunjukkan pada Tabel 2.4 terlampir.

2.5 Penelaahan Usulan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Penjaringan aspirasi masyarakat terhadap perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 dihimpun melalui jalur partisipatif yaitu melalui kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kabupaten Bogor tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten, melalui jalur partisipatif dapat dihimpun sejumlah usulan kegiatan dari 40 kecamatan maupun masukan dari perangkat daerah.

Selain melalui jalur partisipatif, penjaringan aspirasi juga dilakukan melalui jalur politik. Penjaringan aspirasi ini dilakukan oleh DPRD melalui reses di daerah pemilihan serta janji Bupati melalui kegiatan pertemuan langsung dengan masyarakat yang diakomodir dalam pokok-pokok pikiran DPRD. Akan tetapi pada tahun 2026 jalur politik tidak ada usulan kegiatan. Dari aspirasi masyarakat yang disampaikan tersebut dilakukan seleksi untuk mensinkronkan usulan masyarakat dengan prioritas pada target kinerja pelayanan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan. Beberapa usulan belum dapat diakomodir dan dijadikan prioritas pada rencana kerja tahun 2026. Hal tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan anggaran tahun pelaksanaan. Adapun uraian usulan program, kegiatan dan sub kegiatan dari para pemangku kepentingan terhadap Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor tahun 2026 ditunjukkan pada Tabel 2.5 terlampir.



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sasaran pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2026, diharapkan dapat mendorong tersedianya lapangan pekerjaan, peningkatan kesejahteraan, penurunan ketimpangan, dan pembangunan ramah lingkungan. Tahun 2026 merupakan tahun kedua periode teknokratik RPJMN tahun 2025-2029. Terdapat 5 (lima) agenda pembangunan nasional pada tahun 2025-2029 yang meliputi: 1. Transformasi Sosial; 2. Transformasi Ekonomi; 3. Transformasi Tata Kelola; 4. Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia; dan 5. Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi. Adapun capaian agenda pembangunan nasional ditandai oleh 6 (enam) indikator makro, yaitu: Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Tingkat Kemiskinan, Rasio Gini, Indeks Modal Manusia, Penurunan Intensitas Emisi GRK, dan Nilai Tukar Petani.

Kebijakan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor berdasarkan tugas pokok dan fungsinya mengacu kepada Rencana Strategis Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, serta Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Negara (RPJPN) Tahun 2025-2045, pembangunan nasional diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing.

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor penting dalam pembangunan ekonomi nasional, dimana kondisi kebutuhan bahan pangan saat ini semakin meningkat, namun dihadapi oleh kondisi alih fungsi lahan yang semakin tinggi, harga komoditas pangan yang cenderung meningkat, serta cadangan beras pemerintah yang semakin terbatas.



Adapun dasar – dasar strategi pembangunan nasional adalah :

1. Membangun tanpa meningkatkan ketimpangan antar wilayah;
2. Memanfaatkan sumber daya alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
3. Membangun dari desa;
4. Ekonomi harus berorientasi dan berbasiskan pada sektor dan jenis usaha yang memasukkan nilai tambah sebesar-besarnya dengan SDM berkualitas, inovasi, kreatif, dan penerapan teknologi yang tepat;
5. Pembangunan nasional sebagian besar adalah hasil agregasi dari pembangunan daerah yang berkualitas.

Adapun prioritas pembangunan nasional adalah :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Strategi alokasi pada prioritas pembangunan nasional adalah :

1. Membangun untuk manusia dan masyarakat;
2. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial, dan pembangunan ekologi yang berkelanjutan;
3. Memulihkan dan menjaga keseimbangan antar sektor, antar wilayah dan antar kelompok sosial dalam pembangunan;
4. Mewujudkan perekonomian yang inklusif, berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, dan keunggulan sumber daya manusia.



Fokus alokasi pada prioritas pembangunan nasional adalah :

1. Pembangunan sektor unggulan, yaitu :
 - Kedaulatan pangan
 - Energi ketenagalistrikan
 - Kemaritiman
 - Pariwisata
2. Pembangunan kebutuhan dasar, yaitu :
 - Pendidikan
 - Kesehatan
 - Perumahan
3. Pengurangan kesenjangan, yaitu :
 - Antar kelompok pendapatan
 - Antar wilayah

Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional adalah :

1. Melanjutkan kebijakan ekonomi yang pro-growth, pro-job, pro-poor dan pro-environment;
2. Kebijakan hilirisasi pengelolaan sumberdaya alam;
3. Pemberian insentif fiskal dan non fiskal untuk pengembangan industri di luar Jawa;
4. Sinergi SDM dan IPTEK dengan industri;
5. Pengembangan sektor pertanian dan infrastruktur perdesaan;
6. Penguatan kelembagaan masyarakat dan UKM;
7. Penguatan ketahanan pangan dan energi;
8. Akselerasi pembangunan infrastruktur untuk mendukung sistem logistik nasional.

Arah kebijakan nasional harus memenuhi 3 (tiga) kriteria utama, yaitu:

1. *Economically Feasible*, dengan ciri :
 - a. Program-program yang dikembangkan harus dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
 - b. Mempunyai nilai tambah tinggi;
 - c. Program harus berdampak signifikan terhadap pembangunan nasional dan wilayah;
 - d. Menunjang sinergi dan optimalisasi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi;



- e. Melanjutkan program-program strategis yang belum tercapai;
 - f. Berdampak luas terhadap investasi nasional.
2. *Social Acceptable*, dengan ciri :
- a. Tidak menimbulkan masalah baru;
 - b. Membuka/menyerap lapangan kerja;
 - c. Mengurangi kemiskinan;
 - d. Mengurangi kesenjangan antar kelompok masyarakat dan antar wilayah;
 - e. Memberikan dampak untuk kepentingan masyarakat luas;
 - f. Meningkatkan keharmonisan masyarakat;
 - g. Mendorong tingkat partisipasi masyarakat.
3. *Environmentally Sustainable*, dengan ciri :
- a. Dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan masih dalam batas yang dapat ditoleransi (*carrying capacity*);
 - b. Memperbaiki kualitas lingkungan;
 - c. Program yang dikembangkan menghasilkan manfaat tidak hanya bagi generasi saat ini, namun juga bagi generasi mendatang (*sustainable*).

Arah kebijakan yang terkait langsung dengan Kementerian Pertanian adalah pengembangan sektor pertanian dan infrastruktur perdesaan. Perencanaan pembangunan nasional dikelompokkan dalam sembilan bidang pembangunan menurut Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025 - 2045. Bidang yang terkait langsung dengan Kementerian Pertanian adalah bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan prioritas peningkatan ketahanan pangan, revitalisasi pertanian, perikanan, SDM pertanian dan peternakan.

Indonesia telah berkomitmen untuk mencapai Net-Zero Emission pada tahun 2060 atau lebih cepat. Target ambisius tersebut telah terakomodasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, dimana diantara lima sasaran utama dalam Visi Indonesia 2045 adalah Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca menurun menuju Net Zero Emission dengan target 93,5 persen di tahun 2045. Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca dilakukan dengan memperkuat program Pembangunan Rendah Karbon yaitu: 1. Peningkatan Proporsi Energi Baru Terbarukan dalam



Bauran Energi Primer; 2. Efisiensi Energi; 3. Peningkatan Transportasi Hijau dan Berkelanjutan; 4. Peningkatan Cadangan Karbon di Kawasan Hutan dan Lahan; 5. Pencegahan Pengurangan Cadangan Karbon di Kawasan Hutan dan Lahan; 6. Implementasi Praktik Pertanian yang Rendah Karbon; 7. Peningkatan Cadangan Karbon di Ekosistem Karbon Biru; 8. Pengembangan Industri Hijau; 9. Dan Pengelolaan Limbah dan Ekonomi Sirkular.

Arah kebijakan dalam rangka pencapaian target Nilai Tukar Petani menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan dari sisi harga yang diterima dan sisi harga yang dibayarkan oleh petani. Kebijakan dari sisi harga yang diterima berorientasi pada upaya yang meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk pertanian, serta menjaga stabilisasi harga yang diterima. Kebijakan tersebut mencakup (1) pengembangan kawasan sentra produksi pangan dan sentra produksi lainnya untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas pertanian; (2) hilirisasi komoditas pertanian berbasis bioindustri untuk meningkatkan nilai tambah komoditas; (3) pengembangan kelembagaan ekonomi petani menjadi korporasi untuk meningkatkan kapasitas produksi serta kualitas produk pertanian; dan (4) pengembangan ketertelusuran produk pertanian bernilai tambah seperti nilai budaya (*Globally Important Agricultural Heritage Systems*), geografis/endemik (Indeks Geografis), ataupun keberlanjutan (pertanian organik).

Kebijakan dari sisi harga yang dibayar petani berorientasi pada upaya yang menjamin keterjangkauan input usaha tani meliputi (1) modernisasi akses pembiayaan usaha pertanian melalui digitalisasi akses pembiayaan serta kemitraan dengan agen sumber pembiayaan; (2) pengendalian inflasi produk agro input melalui peningkatan produksi dan akses pupuk, pestisida, benih, serta sarana dan prasarana; (3) reformasi subsidi pupuk dan input pertanian lainnya melalui Bantuan Langsung Petani; dan (4) modernisasi pertanian melalui praktik pertanian presisi dan praktik pertanian konservasi agar usaha tani lebih efisien dan berkelanjutan.

Secara ringkas target indikator pembangunan nasional pada tahun 2025 adalah sebagai berikut : 1. Pertumbuhan Ekonomi 5,3-5,6%; 2. Tingkat Pengangguran Terbuka 4,5-5,0%; 3. Tingkat



Kemiskinan 7,0-8,0%; 4. Rasio Gini 0,379-0,382 poin; 5. Indeks Modal Manusia 0,56 poin; 6. Penurunan Intensitas Emisi GRK 38,6%; 7. Nilai Tukar Petani 113-115; (Sumber : Kementerian PPN/Bappenas, 2025).

Peta Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya pendapatan keluarga petani;
2. Meningkatnya ketahanan pangan nasional;
3. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian nasional;
4. Stabilitasnya harga komoditas pertanian strategis;
5. Terjaminnya kualitas dan keamanan pangan strategis nasional;
6. Terpenuhinya kebutuhan pangan strategis nasional;
7. Dimanfaatkannya inovasi teknologi;
8. Tersedianya infrastruktur pertanian yang sesuai kebutuhan;
9. Terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman;
10. Meningkatnya penerapan pengelolaan pertanian terpadu di pedesaan;
11. Meningkatnya kualitas kelembagaan petani nasional;
12. Terwujudnya reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pertanian.

Keterkaitan antara arah kebijakan nasional dengan kewenangan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor dengan mempedomani program-program yang telah ditetapkan dalam renstra perangkat daerah.

Selain kebijakan nasional, kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Barat yang berkaitan dengan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor adalah Tujuan Keempat yaitu Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Umat yang Sejahtera dan Adil Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital



dan Kolaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi serta Pelaku Pembangunan. Adapun strategi bidang pertanian yaitu :

1. Menyediakan pangan berkualitas bagi masyarakat;
2. Mengembangkan inovasi untuk peningkatan produksi/ produktivitas dan nilai tambah hasil pertanian, kehutanan, serta kelautan dan perikanan.

Dengan arah kebijakan pembangunan pertanian yaitu :

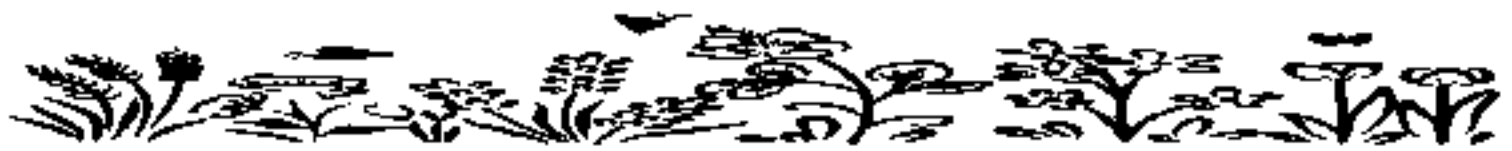
1. Meningkatkan ketersediaan, akses distribusi, keamanan dan penguatan cadangan, serta konsumsi pangan yang beragam;
2. Revitalisasi lahan, dukungan infrastruktur, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengembangan sumber daya manusia;

Tahun 2026 merupakan tahun kedua pada periode perencanaan jangka menengah provinsi tahun 2025-2029. Tema pembangunan Jawa Barat tahun 2026 adalah **"Pemerataan Pembangunan untuk Mendukung Masyarakat Jawa Barat"**, dengan target kinerja makro sebagai berikut :

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,81 %.
2. Kemiskinan sebesar 7,13 %.
3. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 7,88 %.
4. Indeks Gini sebesar 0,383 %.
5. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 74,39 poin.
6. Pendapatan per Kapita (ADHB) sebesar 61,57 juta.

Adapun tujuan pembangunan Jawa Barat tahun 2026 adalah :

1. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
2. Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan;
3. Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Wilayah yang didukung Infrastruktur Berkualitas dan Lingkungan yang Berkelanjutan;
4. Terciptanya Demokrasi dan Birokrasi yang Berkualitas dan Didukung oleh Inovasi Daerah.



Berdasarkan hal tersebut, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Provinsi Jawa Barat dalam rencana kinerja tahun 2026 melaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**, dengan indikasi kegiatan:
 - a. Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian;
 - b. Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian;
 - c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian;
 - d. Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman;
 - e. Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih;
 - f. Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura;
 - g. Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan;
 - h. Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan;
 - i. Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan;
 - j. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi;
 - k. Penilaian Kultivar SDG Hewan;
 - l. Penilaian Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme;
 - m. Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan;
 - n. Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme;
 - o. Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi;
 - p. Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi;
 - q. Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi;



- r. Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi;
 - s. Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi;
 - t. Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak;
 - u. Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan;
 - v. Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak;
 - w. Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor;
 - x. Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan;
 - y. Penindakan Atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan;
 - z. Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain;
 - aa. Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain;
 - bb. Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain;
2. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN, dengan indikasi kegiatan:
- a. Penataan Prasarana Pertanian;
 - b. Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian;
 - c. Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian;
 - d. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani;
 - e. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani;
 - f. Pembangunan dan Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan;
 - g. Pembangunan dan Pemeliharaan Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan;
 - h. Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian;
 - i. Pembangunan dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan;



- j. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian lainnya;
 - k. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya;
 - l. Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Wilayahnya Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi;
 - m. Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak;
 - n. Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak;
3. **PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**, dengan indikasi kegiatan:
- a. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi;
 - b. Pengendalian Resiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis;
 - c. Pembebasan Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi;
 - d. Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular;
 - e. Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi;
 - f. Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan;
 - g. Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan;
 - h. Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi;
 - i. Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan;
 - j. Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit;
 - k. Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan;
 - l. Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan kesehatan Masyarakat Veteriner;



- m. Sertifikasi Persyaratan Teknis kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - n. Pengelolaan Penerbitan Sertifikasi Keamanan Produk Hewan;
 - o. Pengembangan Kompetensi Petugas Penilai Penerapan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan;
 - p. Pengelolaan Penerbitan sertifikat kesejahteraan hewan dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV);
 - q. Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan Sesuai Kewenangannya;
4. PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN, dengan indikasi kegiatan:
- a. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi;
 - b. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan;
 - c. Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan;
 - d. Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan;
 - e. Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan;
5. PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN, dengan indikasi kegiatan:
- a. Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian;
 - c. Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota;
 - d. Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian;
 - e. Penerbitan Izin Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner di Daerah Provinsi;
 - f. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - g. Pengawasan Pelaksanaan Izin Laboratorium;
 - h. Penerbitan Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan;
 - i. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan;



- j. Pengawasan Pelaksanaan Izin usaha pengecer obat hewan;
6. **PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**, dengan indikasi kegiatan:
 - a. Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian;
 - b. Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN;
 - c. Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta;
 - d. Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian;
 - e. Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian;
 - f. Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani;
 - g. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan;
 - h. Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani;
 - i. Pendampingan Manajemen Korporasi Petani;
 - j. Penilaian Kelayakan dan Standarisasi Manajemen Korporasi petani;
 - k. Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani.

Keterkaitan antara arah kebijakan Provinsi Jawa Barat dengan kewenangan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor berdasarkan renstra perangkat daerah. Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor Tahun 2026 dibuat dengan mempertimbangkan, mendukung dan mengakomodir serta bersinergi dengan Kebijakan Nasional maupun Provinsi Jawa Barat Tahun 2026.

3.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor Tahun 2026 berpedoman pada dokumen perencanaan jangka panjang tahun 2025-2045 dan periode perencanaan jangka menengah daerah tahun 2025-2029. Sejalan dengan kebijakan Nasional dan Provinsi Jawa Barat serta RPJPD Kabupaten Bogor 2025-2045. Tema RKPD Tahun 2026 adalah **"Optimalisasi Kinerja Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik"**. Adapun tujuan dinas adalah **"Meningkatnya**



produksi pertanian". Adapun sasaran dinas adalah **"Meningkatnya produktivitas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan"**.

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang akan menjadi target kinerja perencanaan tahun 2026 pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor adalah sebagai berikut :

1. Indikator Tujuan :

- a. Jumlah produksi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan (ton).

2. Indikator Sasaran :

- a. Produktivitas pertanian per tahun (ton/ha).

3.3 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2026 memuat uraian seluruh urusan pilihan yang disertai dengan indikator dan target capaian kinerja yang mengacu pada perencanaan jangka panjang tahun 2025-2045 dan perencanaan jangka menengah tahun 2025-2029. Selain itu, rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan disusun berdasarkan pencapaian renstra 2025-2029 mengacu pada tujuan kedua yaitu **"Meningkatnya Produktivitas Ekonomi Daerah"** yang dijabarkan dengan sasaran daerah yaitu **"Meningkatnya Ketahanan Pangan"**. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor dalam renstra melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, dengan kegiatan :

A. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian, dengan sub kegiatan:

- a. Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi;
- b. Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian.

B. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kab/Kota, dengan sub kegiatan :

- a. Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman;
- b. Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Tanaman;
- c. Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman;



- d. Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih.

2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, dengan kegiatan :

A. Pengembangan Prasarana Pertanian, dengan sub kegiatan :

- a. Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B;
- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya;
- c. Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian.

B. Pembangunan Prasarana Pertanian, dengan sub kegiatan :

- a. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani;
- b. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian;
- c. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani;
- d. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit;
- e. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya;
- f. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya;
- g. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air.

3. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian, dengan kegiatan :

A. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :

- a. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan;
- b. Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan;
- c. Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan.



4. Program Perizinan Usaha Pertanian, dengan kegiatan :

- A. Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
 - a. Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian;
 - b. Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian;
 - c. Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian.

5. Program Penyuluh Pertanian, dengan kegiatan :

- A. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, dengan sub kegiatan :
 - a. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa;
 - b. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa;
 - c. Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian;
 - d. Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota;
 - e. Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian;
 - f. Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota;
 - g. Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani;
 - h. Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian.

6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan :

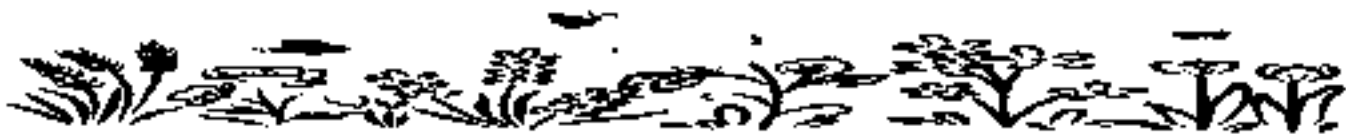
- A. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
 - d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
 - e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
 - f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;



- h. Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah.
- B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
 - c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD;
 - d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
 - e. Pengelolaan dan Penyulapn Bahan Tanggapan Pemeriksaan;
 - f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD;
 - g. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.
- C. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD.
- D. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai;
 - b. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
 - c. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian;
 - d. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai;
 - e. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
 - f. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan;
 - g. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
- E. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;



- f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - g. Fasilitasi Kunjungan Tamu;
 - h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 - i. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD;
 - j. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD;
 - k. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.
- F. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
- a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - b. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - c. Pengadaan Mebel;
 - d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya.
- G. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- H. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Penyusunan dokumen rencana kerja perangkat daerah tahun 2026 berdasarkan renstra perangkat daerah tahun 2025-2029 dan RPJMD tahun 2025-2029 serta dokumen perencanaan jangka panjang tahun 2025-2045 maupun perencanaan jangka menengah tahun 2025-2029. Rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan disusun dengan mencantumkan rencana pendanaan dan sumber pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Bogor. Rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan juga sudah memuat lokasi pelaksanaan dan prakiraan kebutuhan dana pada tahun 2026. Berdasarkan hal tersebut, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor dalam rencana kerja tahun 2026 melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan renstra perangkat daerah dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagai berikut :

- 1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, dengan kegiatan :**
 - A. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian, dengan sub kegiatan :**
 - a. Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi;
 - b. Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian.
 - B. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kab/Kota, dengan sub kegiatan :**
 - a. Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman;
 - b. Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Tanaman;
 - c. Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman;
 - d. Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih.



2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, dengan kegiatan :

- A. Pengembangan Prasarana Pertanian, dengan sub kegiatan :
 - a. Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B;
 - b. Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya;
 - c. Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian.
- B. Pembangunan Prasarana Pertanian, dengan sub kegiatan :
 - a. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani;
 - b. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani;
 - c. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit;
 - d. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya;
 - e. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya;
 - f. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air.

3. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian, dengan kegiatan :

- A. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
 - a. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan;
 - b. Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan;
 - c. Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan.

4. Program Perizinan Usaha Pertanian, dengan kegiatan :

- A. Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
 - a. Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian;
 - b. Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian;
 - c. Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian.



5. Program Penyuluh Pertanian, dengan kegiatan :

- A. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, dengan sub kegiatan :
 - a. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa;
 - b. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa;
 - c. Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian;
 - d. Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota;
 - e. Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian;
 - f. Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota;
 - g. Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani;
 - h. Diteminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian.

6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan :

- A. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
 - d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
 - e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
 - f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
 - c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD;
 - d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
 - e. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan;



- f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD;
 - g. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.
- C. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
- a. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD.
- D. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
- a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai;
 - b. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
 - c. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian;
 - d. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai;
 - e. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
 - f. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan;
 - g. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
- E. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - g. Fasilitasi Kunjungan Tamu;
 - h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 - i. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD;
 - j. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD;



- k. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.
- F. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - b. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - c. Pengadaan Mebel;
 - d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya.
- G. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- H. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Dengan melihat hasil analisis kebutuhan, review terhadap RKPD, serta kebijakan pembangunan nasional maupun Provinsi Jawa Barat pada tahun 2026 yang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 maka rencana kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor tahun 2026 terdiri atas 6 program dan 15 kegiatan dan 71 sub kegiatan yang bersumber dari APBD Kabupaten Bogor. Adapun usulan anggaran yang diajukan sebesar Rp 99.083.005.016,- dengan sumber dana APBD Kabupaten Bogor. Adapun uraian rencana kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan



Kabupaten Bogor tahun 2026 berdasarkan Permaendagri Nomor 90 Tahun 2019 ditunjukkan pada Tabel 4.1 terlampir.

BAB V PENUTUP

Demikian Renja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tahun 2026 telah disusun dengan memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada tahapan penganggaran, Renja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tahun 2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan KUA/PPAS Tahun Anggaran 2026 hingga ditetapkannya APBD Tahun Anggaran 2026.

Dalam hal terdapat ketidaksesuaian substansi dalam Renja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tahun 2026 yang telah ditetapkan mendahului penetapan Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tahun 2025-2029, maka Renja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan akan disesuaikan dalam Perubahan Renja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tahun 2026 Tahun 2026 di tahun berjalan.

Selanjutnya, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan wajib melakukan evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tahun 2026 secara periodik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, agar dapat diketahui pencapaian kinerja terhadap target yang telah ditetapkan, serta menjadi bahan rekomendasi terhadap perencanaan tahun berikutnya.





LAMPIRAN

Kode Rekening	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
				REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
		Produktivitas sayuran	kg/ha	131						
		1. Persentase nilai tambah tanaman hortikultura	%	10						
	0001	Pengelolaan produksi tanaman hortikultura	Jumlah bibit tanaman hortikultura	jenis	2					
	0002	Pengendalian Hama Penyakit Tanaman Hortikultura	Jumlah peserta gerakan PHT	orang	60					
	0006	Pengembangan, Pengolahan, dan Pemasaran Hasil Produk Tanaman Hortikultura	Jumlah alat pengolah buah-buahan	jenis	37					
	0005	Perencanaan Pasca Panen Hortikultura	Jumlah alat pasca panen	unit	494					
	0004	Pelayanan Usaha Tanaman Hortikultura	Jumlah pelaku usaha hortikultura yang dibina	pelaku	20					
	0003	Pengembangan prasarana dan infrastruktur tanaman hortikultura	Jumlah Prasarana Produksi	jenis	2					
	1000	Pembenahan pertanian hortikultura (DID Tambahan)	Jumlah irigasi perompakan yang dibangun	unit	3					
	1001	Facilitasi Sarana Edukasi Urban Farming (Dana Hibah Kementerian Perwisala)	Jumlah Sarana Edukasi Urban Farming	unit	20					
	1002	Facilitasi Pemasaran Produk Pertanian (Dana Hibah Kementerian Perwisala)	Alat Dahan Hortikultura	paket	13					
20	03	04	22	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Nilai Tambah Tanaman Perkebunan	1. Produksi Tanaman Perkebunan	ton	8.602			
					2. Persentase nilai tambah tanaman perkebunan	%	6			
			0004	Pelayanan Usaha Tanaman Perkebunan	Jumlah Usaha Perkebunan	perusahaan	15			
			0002	Pengendalian Hama Penyakit Tanaman Perkebunan	Jumlah obat-obatan pengendali hama	jenis	4			
			0001	Pengelolaan produksi tanaman perkebunan	Luasan lahan yang ditanami	ha	115			
			0005	Perencanaan pasca panen tanaman perkebunan	Jumlah alat pasca panen tanaman perkebunan	jenis	14			
			0006	Pengembangan, Pengolahan, dan Pemasaran Hasil Produk Tanaman Perkebunan	Jumlah alat pengolahan tanaman perkebunan	jenis	1			
			0003	Pengembangan prasarana dan infrastruktur pertanian tanaman perkebunan	Jumlah Prasarana Produksi Perkebunan	jenis	2			
20	03	01	24	Program Pengembangan Teknologi Pertanian	Persentase pelayanan teknis pertanian	%	80			
					Jumlah benih/bibit unggul yang dihasilkan	ton	80			
					Jumlah data dan informasi pertanian	dok	2			
			0001	Kaji Terap Teknologi Pertanian I Wilayah Parung Panjang	Jumlah kaji terap pengembangan teknologi pertanian	komoditas	1			
			0002	Kaji Terap Teknologi Pertanian II Wilayah Cigudeg	Jumlah kaji terap pengembangan teknologi pertanian	komoditas	1			

Kode Rekening				PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
							REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	$11 = (10/9) \times 100\%$
			0003	Kaji Terap Teknologi Pertanian II Wilayah Leuwiliang	Jumlah kaji terap pengembangan teknologi pertanian	komoditas	1						
			0004	Kaji Terap Teknologi Pertanian IV Wilayah Cibungbuleng	Jumlah kaji terap pengembangan teknologi pertanian	komoditas	1						
			0005	Kaji Terap Teknologi Pertanian V Wilayah Dramaga	Jumlah kaji terap pengembangan teknologi pertanian	komoditas	1						
			0006	Kaji Terap Teknologi Pertanian VI Wilayah Caringin	Jumlah kaji terap pengembangan teknologi pertanian	komoditas	1						
			0007	Kaji Terap Teknologi Pertanian VII Wilayah Ciawi	Jumlah kaji terap pengembangan teknologi pertanian	komoditas	1						
			0008	Kaji Terap Teknologi Pertanian VIII Wilayah Cibinong	Jumlah kaji terap pengembangan teknologi pertanian	komoditas	1						
			0009	Kaji Terap Teknologi Pertanian IX Wilayah Cibinong	Jumlah kaji terap pengembangan teknologi pertanian	komoditas	1						
			0010	Kaji Terap Teknologi Pertanian X Wilayah Gunung Putri	Jumlah kaji terap pengembangan teknologi pertanian	komoditas	1						
			0011	Kaji Terap Teknologi Pertanian XI Wilayah Jonggol	Jumlah kaji terap pengembangan teknologi pertanian	komoditas	1						
			0012	Kaji Terap Teknologi Pertanian XII Wilayah Caru	Jumlah kaji terap pengembangan teknologi pertanian	komoditas	1						
			0013	Pengembangan Perbenihari/Partibitan I Wilayah Timur	Jumlah benih padi label putih	kg	750						
			0014	Pengembangan Perbenihan/Partibitan II Wilayah Barat	Luas areal untuk pengembangan benih kacang tanah	ha	2						
			0016	Pengembangan Tanaman Obat	Jumlah bibit tanaman obat	kg	1.300						
			0015	Pengembangan Pemanfaatan Teknologi Lahan Kering	Jumlah percontohan teknologi budidaya lahan kering	komoditi	2						
			0017	Penyusunan Monografi Pertanian	Jumlah dokumen SP Bulanan, SP Triwulan, SP Tahunan, Buku Monografi, Buku Saku	dokumen	18						
			0018	Penyusunan Sasaran Intensifikasi	Jumlah dokumen sasaran intensifikasi	dokumen	1						
			1000	Pembibitan Tanaman Telas (DID Tambahan)	Jumlah bibit telas	batang	10.000						
			1001	Pembibitan Tanaman Obat (DID Tambahan)	Jumlah bibit jahe dan kunyit	kg	600						
20	03	05	26	Program Pengembangan SOM Pertanian dan Kelambagaan Petani	Jumlah metode teknologi pertanian	unit	12						
					Jumlah kelompok tani yang meningkat kelas kemampuannya	kelompok	5						
					Persentase penyuluh pertanian yang meningkat kompetensinya	%	100						
			0001	Metode Penyuluhan Pertanian	Jumlah metode penyuluhan	jenis	2						
			0000	Agro Farming System	Jumlah kaji terap teknologi pertanian	paket teknologi	3						
			0004	Penyusunan Rencana Definif Kebutuhan Kelompok (RDKK)	Jumlah dokumen RDKK	dokumen	1.810						
			0005	Penguatan Kelambagaan Penyuluhan	Jumlah petani milenial yang terbentuk	kelompok	10						

Kode Rekening	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024			
				REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	$11 = (10/9) \times 100\%$	
		Jumlah penyelenggaraan HKP Tk. Kab	kali	1							
	0002	Penyebarluasan informasi teknologi pertanian	materi	23							
	0008	Peningkatan kinerja penyuluh pertanian	unit	70							
	0006	Pengendalian Penyuluhan Pertanian Di Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten	kali	3							
		Jumlah pertemuan penyuluhan di tingkat kabupaten	kali	1							
	0007	Penyusunan Program dan Rencana Kerja Penyuluh Pertanian	jenis	2							
20	03	01	01	Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawain, Kecangan, Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	Indeks kepuasan layanan sekretariat	%	85				
					Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai	%	75				
					Persentase perencanaan sesuai target	%	85				
					Persentase kinerja keuangan perangkat daerah sesuai target	%	90				
					Persentase pelayanan kepegawain	%	85				
					Persentase pelayanan kepegawain	%	85				
				0001	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa yang dibayarkan	janjian	12			
						bulan	12				
				0054	Pengelolaan Legalitas Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional/jabatan yang dipelihara perizinannya	unit	305			
				0053	Pengelolaan Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga kebersihan	orang	10			
						bulan	12				
				1000	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	orang	3			
						bulan	12				
				0201	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	Jumlah kendaraan dinas operasional	unit	1			
				0207	Pengadaan Instalasi Jaringan Listrik, Air dan Telekomunikasi	Jumlah komponen listrik	jenis	13			
				0002	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jenis	7.527			

Kode Rekening	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
				REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	$11 = (10/9) \times 100\%$
	0003	Persediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik	jenis	3					
	0004	Persediaan Makanan dan Minuman	jumlah makan & snack	posisi	4.775					
	0450	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah rapat dalam dan luar daerah	kal	705					
	0051	Pengelolaan Dokumentasi dan Arsip PD	Penataan dokumentasi dan arsip dinas	bulan	12					
	1003	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah administrasi kepegawaian yang dikelola	bulan	12					
		Buku Pantuan Kepegawaian		dokumen	1					
	0060	Pengelolaan Aset PD	Jumlah administrasi barang yang dikelola	bulan	12					
		KIB		dokumen	5					
	0052	Pengelolaan Keamanan Kantor	Pembayaran jasa piket dan satpam	orang	18					
				bulan	12					
	0206	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang diadakan	jenis	8					
	0351	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Utama Kantor	Jumlah gedung utama kantor yang dipelihara	unit	1					
	0352	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Penunjang Kantor	Jumlah gedung penunjang kantor yang dipelihara	unit	3					
	0357	Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Jaringan Listrik, Komputer dan Komunikasi	Jumlah jaringan komputerisasi/internet yang dipelihara	jenis	1					
	0354	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional/jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional/jabatan yang dipelihara	unit	37					
	0355	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	unit	50					
	0356	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	jumlah peralatan kantor yang dipelihara	unit	136					
	1002	Pengadaan pakaian dinas	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	setel	330					
	1004	Pengembangan Kapasitas dan Kompetensi Aparatur	Jumlah penyuluh yang mengikuti bimbingan teknis/ pelatihan	orang	80					
	1001	Pembinaan Jasmani dan Rohani Aparatur	Jumlah pembinaan jasmani dan rohani	kal	37					
	2003	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	Jumlah Laporan Kinerja SKPD	dokumen	4					
	2004	Penyusunan Perencanaan Anggaran	Jumlah dokumen yang dibuat	dokumen	5					
	2002	Penatausahaan Keuangan PD	jumlah dokumen yang diproses	dokumen	2.061					
	2007	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan PD	Jumlah Dokumen pelaporan capaian kinerja	dok	18					
	2008	Publikasi Kinerja PD	Jumlah Publikasi Kinerja SKPD	tahun	1					
	2005	Penyusunan Perencanaan PD	Jumlah dokumen renja SKPD :	dokumen	6					
	0250	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	Jumlah gedung (pagar) yang dirshab							
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produktivitas pertanian pangan per hektar per tahun (ton/ha)	ton/ha		7	7,18	7,37		

Kode Rekening	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024			
				REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%	
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah perluasan areal tanam	ha		180.576	98.338	91.007				
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Bidang Tanaman Pangan)	Jumlah Benih Jagung Hibrida	kg		750						
		Jumlah NPK	kg		12.000						
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Bidang Hortikultura)	Jumlah benih/bibit alpukat (kawasan buah)	pohon		1.500						
		Jumlah benih/bibit sayuran	pack		888						
		Jumlah Mula	rol		210						
		Jumlah Obat-obatan Padat	kg		7.330						
		Jumlah Peralatan Kultur Jaringan	set		1						
		Jumlah Kultivator	unit		4						
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Bidang Perkebunan)	Jumlah bibit cengkeh	pohon		9.000						
		Jumlah bibit kopi Robusta	pohon		15.000						
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Bidang Tanaman Pangan)	Husker/Huller	unit		4						
		Paddy Mower	unit		20						
		Polisher (perycosh beras)	unit		4						
		Power Thresher Kecil	unit		20						
		Tepal rantai jenur	unit		100						
3	27	02	2.01	01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah pupuk non subsidi yang disalurkan kepada masyarakat	kg/te:bt		87.500	72.625	
						Jumlah pestisida yang disalurkan kepada kelompok tani	Kg		4.150	5.250	

Kode Rekening	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024			
				REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	$11 = (10/9) \times 100\%$	
		Pengawasan penyuluran pupuk dan pestisida dari kios ke petani	laporan			1					
		Jumlah kelompok Pekarangan Pangan Lestari (P2L) Tahap Perumbuhan yang difasilitasi	kelompok				2				
		Jumlah pupuk hayati cair yang disalurkan kepada kelompok tani	liter				8.000				
		Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan				1				
		Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Bidang Hortikultura)	Jumlah motor roda 3	unit	5						
		Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Bidang Perkebunan)	Jumlah Alas Panen	unit	30						
		Jumlah Alat Sortir Kopi Manual	unit		9						
		Jumlah Huler Kopi	unit		3						
		Jumlah pulper kopi	unit		4						
3	27	02	2.01	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah bantuan alat dan mesin pertanian	jenis		12	9	
					Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	laporan			2	5	
					Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komoditas benih/bibit tanaman pertanian	komoditas		3	3	3
					Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman (UPT Perbenihan Wilayah I)	jumlah benih kopi (bij)	bij		10.000		
						Jumlah Benih Talas	anakan		10.000		
						Jumlah bibit kopi robusta (stek bersakar)	batang		14.785		
						Jumlah obat-obatan	jenis		7		
						Paraset	meter		300		
					Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman (UPT Perbenihan Wilayah II)	Benih padi FS	kg		1.084		
						Jumlah obat-obatan	jenis		11		

Kode Rekening	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024								
				REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	$11 = \frac{(6/7)}{8} \times 100\%$						
	Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan SDG Hewan/Tanaman (LPT Pengembangan Tasarasi Obat)	Jahit swalah	kg		500											
		Media Tanam	kg		1.000											
		Obat-obatan	pack		2											
		Polybag	kg		70											
3	27	02	2.02	01	Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Benih Jagung Hibrida	kg		343	1.500						
						Jumlah Benih Padi	kg		50.000	2.400						
						Jumlah bibit buah	pcs/ha		8.250							
						Jumlah bibit bibit sayuran	pcs/ha		600							
						Jumlah bibit kopi	batang		12.800							
						Jumlah penyediaan bibit bibit alpukat	batang			1.500						
						Jumlah penyediaan bibit bibit durian	batang			3.100						
						Jumlah penyediaan bibit bibit manggis	batang			1.000						
						Jumlah penyediaan bibit bibit pala	batang			450						
						Jumlah penyediaan bibit bibit cabai	pack/ha			350						
						Jumlah penyediaan bibit bibit kopi	batang			9.700						
						Jumlah penyediaan bibit bibit lada	batang			73.000						
						Jumlah penyediaan musa plastik	roll			400						
						Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pestisida dan Pemukiman	unit			1						
3	27	02	2.02	02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Tanaman	Jumlah dokumen inventarisasi alat	dokumen			3						
						Tersedianya alat bergalat	unit			6						
						pembinaan UPIA	keompok tani			44						
					Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Tanaman (LPT Pertanian Wilayah II)	Jumlah alat perbengkelan yang tersedia	jenis				7					
						Jumlah pembinaan UPIA yang difasilitasi	UPIA				13					
						Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	dokumen				1					
					Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Tanaman (LPT Pertanian Wilayah VI)	Jumlah alat perbengkelan yang tersedia	jenis				5					
						Jumlah pembinaan UPIA yang difasilitasi	UPIA				14					
						Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	dokumen				1					
					Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Tanaman (LPT Pertanian Wilayah X)	Jumlah alat perbengkelan yang tersedia	jenis				3					

Kode Rekening	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%) 11 = (10/9) x 100%	
				REALISASI				TARGET	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		Jumlah pembinaan UPUA yang difasilitasi	UPUA				18				
		Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	dokumen				1				
	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman (Bidang Tanaman Pangan)	Alat Corn Sifter	unit		2						
		Alat Sifter Tester	unit		10						
		Alat Motor Roda Tiga	unit		7						
		Jumlah Pemakai Segitang	unit		3						
		Jumlah Sifter	unit		10						
		Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman (Bidang Hortikultura)	Alat Cakram Jala	paket		1					
	Alat Cakram Keripik Pisang		paket		1						
	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman (Bidang Perikanan)	Jumlah Perlatan Sedot Kopi Nelayan	set		10						
		Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman (UPT Pengembangan Teknologi Lahan Kering)	Jumlah benih jagung	kg		50					
	Jumlah benih kacang tanah		kg		150						
	Dokumen hasil Kaji		dokumen		2						
	Terfasilitas nya operasional UPT		UPT		1						
3	27	02	2.02	03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah benih padi yang benih Rikat	ton		10		
				Jumlah benih bibit buah-buahan yang tersedia		batang		1.500			
				Jumlah bibit tanaman obat yang tersedia		polybag		4.500			
				Jumlah bibit tanaman perkebunan yang bergairah		potong		13.400			
				Dokumen hasil pemetaan teknologi		dokumen		5			
				Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman (UPT Pertanian Wilayah III)		Jumlah Bibit Mlai Jalar	beban		15.000		
						Jumlah benih kacang tanah	kg		480		
				Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman		dokumen		1			
				Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman (UPT Pertanian Wilayah V)		Jumlah Fasilitas PNH (Bibit Cabai Merah, Cabe, Cabe Rawit, Terung, dan Tomat)	polybag		10.000		
						Jumlah benih/bibit tanaman obat yang tersedia	polybag		8.500		
					Jumlah benih tanaman sayuran	potong		-			
					Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	dokumen		1			

Kode Rekening	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024			
				REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%	
	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman (UPT Pertanian Wilayah VIII)	Jumlah bahan kimia pertanian yang disediakan	jenis				7				
		Jumlah bibit kopi dan pala siap salur	batang				13.550				
		Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	dokumen				1				
	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman (UPT Pertanian Wilayah IX)	Jumlah bibit tanaman buah siap salur	batang				1.500				
		Jumlah bibit tanaman hias siap salur	batang				150				
		Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	dokumen				1				
	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman (UPT Pertanian Wilayah XII)	Jumlah benih padi yang bersertifikat	ton				60				
		Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	dokumen				1				
3	27	03		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Presentase pemenuhan prasarana pertanian	%		98		100	
3	27	03	2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah data potensi pengembangan prasarana pertanian	dokumen		1		1	
3	27	03	2.01	01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/MP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Jumlah dokumen potensi lahan tidak produktif	dokumen		1	1	
3	27	03	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah rapat updating data potensi lahan pertanian kurang produktif	kali		1	1	
3	27	03	2.01	04	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Jumlah kajian Pengembangan Prasarana Pertanian	dokumen		1	2	
3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian yang terbangun dan terpelihara	unit		30	25	35
3	27	03	2.02	01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tension (RJIIT)	unit		11	17	23
3	27	03	2.02	02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah bangunan Embung pertanian	unit		5	1	
3	27	03	2.02	03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah ruas jalan usaha tani yang terbangun	unit		3	1	2
3	27	03	2.02	04	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Pembangunan Dam Parit	unit		8	2	5
3	27	03	2.02	05	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya (Bidang Hortikultura)	DED/SADC	paket		1		

Kode Rekening					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
								REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	$11 = (10/9) \times 100\%$
3	27	03	2.02	06	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya (Bidang Perkebunan)	Jumlah Bangunan Pengerig	unit		3					
3	27	03	2.02	09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah bangunan pengolahan hasil pertanian (LPHRPH)	unit			1	2			
						Jumlah bangunan pengerig hasil pertanian/ Dome	unit			1				
						Jumlah bangunan penggilingan padi (RMU)	unit			1				
						Jumlah hidroponik	unit			1				
						Jumlah Green House	unit				3			
						Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	unit				5			
3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase luas lahan pertanian yang diarsunseikan untuk meminimalkan resiko bencana pertanian	%		45		49			
3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah cakupan luas lahan pengendalian dan penanganan bencana pertanian	ha		20.000		22.653			
3	27	05	2.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Bidang Tanaman Pangan)	Jumlah Fungisida	botol		2.000					
						Jumlah Insektisida	botol		1.400					
						Jumlah Rodentisida	kg		1.150					
3	27	05	2.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Bidang Hortikultura)	Jumlah Fungisida	botol		150					
3	27	05	2.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Bidang Perkebunan)	Jumlah Fungisida	botol/bungkus		150					
						Jumlah Insektisida	botol/bungkus		150					
						Jumlah knapsack	unit		6					

Kode Rekening					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
								REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	$11 = (10/9) \times 100\%$
3	27	05	2.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah gerakan pengendalian OPT dan sarana pendukungnya	gerakan			4				
						Jumlah luasan pengendalian OPT	ha			790				
					Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (UPT Pertanian Wilayah I)	Jumlah gerakan pengendalian OPT dan sarana pendukungnya	Gerakan				8			
						Jumlah Lokasi Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu	Kelompok Tani					13		
						Jumlah Lokasi Diseminasi Teknologi Pengendalian OPT	Kelompok Tani					2		
						Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Ha					13		
					Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (UPT Pertanian Wilayah XII)	Jumlah gerakan pengendalian OPT dan sarana pendukungnya	Gerakan					8		
						Jumlah Lokasi Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT)	Kelompok tani					10		
						Jumlah Lokasi Diseminasi Teknologi Pengendalian OPT	Kelompok Tani					2		
						Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Ha					500		
3	27	05	2.01	02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	ha		20.000	10.000	22.628			
						Jumlah temu teknis dampak perubahan iklim (DPI)	kali				3	3		
3	27	06			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Tingkat pelayanan pembertan pertimbangan teknis [jin usaha pertanian	%		37	71	100			
3	27	06	2.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha dalam mendapatkan arahan teknis yang terfasilitasi	pelaku usaha		68	58	59			

Kode Rekening	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEMERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024						
				REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)				
				5	6	7	8	9	10	$11 = (10/9) \times 100\%$				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
2	27	06	2.01	01	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pelayanan Izn Usaha Perikanan	Jumlah SOP pelayanan usaha yang diterbitkan	dokumen			1	1			
						Jumlah Data pelayanan usaha yang diterbitkan	dokumen			3	3			
						Dokumen statistik perikanan	dokumen			59	16			
						Dokumen Monografi perikanan	dokumen			25	30			
						Laporan informasi harga pasar	laporan			1	1			
						Jumlah laporan LTT	laporan			40				
						Jumlah Buku Saku	dokumen			100	30			
						Standar Pelayanan Publik, Pelayanan Izn Usaha Perikanan	dokumen				16			
3	27	06	2.01	02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Perimbangan Teknik Izn Usaha Perikanan	Jumlah pertimbangan teknik pelayanan usaha	skit usaha			2				
						Penilaian teknik ketuna/perangkar	skit usaha			2				
						Regulasi ketuna	kebijakan			11	11			
						Rekomendasi sertifikat bertahap	rekom			21	1			
						Uji mutu beras ASN	uji mutu			23	44			
						Promosi konsultasi unggulan perikanan	kegiatan			1	3			
						Terfasilitasinya kerja sama usaha kelompok lain beras ASN	kelompok lain			23	22			
						Jumlah dokumen analisis hasil usaha kecil	dokumen				1			
						Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Perimbangan Teknik Izn Usaha Perikanan	dokumen				1			
1	27	06	2.01	03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izn Usaha Perikanan (Bidang Hortikultura)	kebud hortikultura terintegrasi	kegiatan			15				
3	27	06	2.01	03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izn Usaha Perikanan (Bidang Perikanan)	Terlaksananya pelayanan usaha perikanan	perusahaan			16				
3	27	06	2.01	03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izn Usaha Perikanan	Jumlah pembinaan pelaku usaha	pelaku usaha			58				
						Jumlah pengawasan penerapan izin usaha								
						Facilitasi promosi komoditas unggulan perikanan	kegiatan			4				
						Terfasilitasinya kerja sama usaha kelompok lain beras ASN	kelompok lain			128				
						Jumlah percontohan agribisnis	unit			2				

Kode Rekening	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
				REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	$11 = (10/9) \times 100\%$
	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian (IUP Pertanian Wilayah IV)	Jumlah fasilitasi promosi komoditas unggulan pertanian	kal				5			
		Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	Laporan				10			
	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian (IUP Pertanian Wilayah VII)	Jumlah fasilitasi promosi komoditas unggulan pertanian	kal				5			
		Jumlah percontohan agribisnis	unit				1			
		Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	Laporan				60			
3	27	07								
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase peningkatan kemampuan kelas kelompok berdasarkan skor penilaian	%		8	10	4			
3	27	07	2.01							
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah penyuluh dan petani yang dibina	orang		1.000	1.100	2.100			
1	27	07	2.01	01						
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Bimbingan Teknis Penyuluh Milenial	kal		2	1	12			
		Jumlah Dokumen Program Penyuluhan Tingkat Kecamatan	buku		45	45	45			
		Jumlah Dokumen Program Penyuluhan Tingkat Kabupaten	buku		4	4	4			
		Jumlah Evaluasi Penyuluh Pertanian Swadaya	kal		1	1	1			
		Jumlah Penyuluh Pertanian yang meningkat kompetensinya	orang		165	375	367			
		Jumlah Pertemuan Komisi Penyuluhan	kal		1	1	1			
		Jumlah peserta seminar sarasehan program	orang				420			
		Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	unit				37			
3	27	07	2.01	02						
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelompok yang menyusun RDKK	kelompok		2.407	2.407	2.150			
		Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	unit				12	73		
		Terfasilitasinya bibit untuk lomba-lomba seperti pesyandu, P2WKSS, sekolah sehat, PKK, dll	bibit			1.600	1.200			
		Jumlah Bintang Petani Milenial	orang			120	200			
		Dokumen Penilaian Kelas Kemampuan Kelompok	kelompok			40	2.150			

Kode Rekening	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%) 11 = (100) x 100%			
				REALISASI				TARGET	REALISASI				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
3	27	07	2.01	03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (UPT Pertanian Wilayah I)	Jumlah alat pertanian palau habs	jenis		2				
					Jumlah benih cabai	Sackot		1					
					Jumlah obat-obatan	jenis		8					
3	27	07	2.01	03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (UPT Pertanian Wilayah II)	Jumlah benih terentang cabai	bungkai		10				
					Jumlah media tanam	kg		420					
					Jumlah pupuk dan obat-obatan	jenis		1					
3	27	07	2.01	03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (UPT Pertanian Wilayah III)	Jumlah benih padi	kg		13				
					Jumlah obat-obatan	jenis		6					
					Jumlah bibit jaba gajah	kg		8					
3	27	07	2.01	03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (UPT Pertanian Wilayah IV)	Jumlah bibit jaba gajah	kg		8				
					Jumlah obat-obatan	jenis		5					
					Jumlah benih kangkung	kg		4					
3	27	07	2.01	04	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (UPT Pertanian Wilayah V)	Jumlah benih kangkung	kg		4				
					Jumlah ember	liter		40					
					Jumlah polybag	kg		10					
					Jumlah pupuk dan obat-obatan	kg		800					
3	27	07	2.01	03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (UPT Pertanian Wilayah VI)	Jumlah benih jagung	kg		10				
					Jumlah benih kacang tanah	kg		25					
					Jumlah obat-obatan	jenis		3					
3	27	07	2.01	03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (UPT Pertanian Wilayah VII)	Jumlah bibit jaba werah	kg		20				
					Jumlah bibit Kunyit	kg		20					
					Jumlah jeruk nipis	pohon		100					
					Jumlah pupuk kandang	kg		1.000					
3	27	07	2.01	03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (UPT Pertanian Wilayah VIII)	Jumlah bibit padi irpago 11 label putih	kg		5				
					Jumlah media tanam	kg		200					
					Jumlah obat-obatan	jenis		2					
					Jumlah polybag	kg		3					

Kode Rekening					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
								REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
3	27	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan pegawai	bulan		12	12	12			
3	27	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen		35	21	12			
						Jumlah Dokumen Verifikasi Keuangan SKPD	berkas			1.500				
3	27	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Akuntansi SKPD	dokumen		3	2	2			
3	27	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	dokumen		1	1	1			
3	27	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	dokumen		1		1			
3	27	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	dokumen		17	13	15			
3	27	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	dokumen		1	1	1			
3	27	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana Dengan Baik	%			100	100			
3	27	01	2.03	01	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Rekonsiliasi dalam penyusunan laporan	kali			4	18			
						Jumlah buku Rekon	dokumen			12				
3	27	01	2.03		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pelayanan Aparatur Terlaksana Dengan Baik	%		100	100	100			
3	27	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah buku kerja pegawai	buku			350	240			
3	27	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas	setel			-				
3	27	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Administrasi kepegawaian	dokumen		3		4			
3	27	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Pegawai	dokumen		3	8	8			
3	27	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Jasa Instruktur Senam/Beris Berbaris	kali		4	44	325			
3	27	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah jasa aparatur yang mengikuti bimbingan teknis/pelatihan	orang			2				
3	27	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang meningkat kompetensi teknis pertanian	orang			-				
3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelayanan Umum Terlaksana Dengan Baik	%		100	100	100			
3	27	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat listrik dan elektronik 13 jenis	jenis		11	10	12			

Kode Rekening					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
								REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
3	27	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK	jenis		50	51	38			
						Jumlah material				400	200			
3	27	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Alat Rumah Tangga	jenis		6	10	9			
3	27	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor	jenis		3	3	2			
3	27	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan	jenis		10	0	1			
3	27	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perburan Perundang-undangan	Jumlah belanja surat kabar/majalah	jenis		3	3				
						Jumlah Koran Lokal	eksemplar				5.760			
						Jumlah Koran Nasional	eksemplar				1.440			
						Jumlah Majalah Nasional	buah				312			
3	27	01	2.06	08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Mekan dan Snack yang tersedia	porci		2.182	6.067	3.660			
3	27	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat dalam dan luar daerah	kali		302	302	1			
3	27	01	2.06	10	Paralelisasi Ansis Dinamis pada SKPD	Jumlah box ansis	box		1	950	660			
3	27	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	pejajar dinas dalam daerah	kali		40	-	1			
						rapat/pertemuan d luar kantor (full day)	paket							
3	27	01	2.07		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelayanan Umum Tertaksana Dengan Baik	%		100	100	100			
3	27	01	2.06	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa telepon, air, listrik dan internet yang dibayarkan	bulan		12	12				
3	27	01	2.06	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah alat kebersihan	unit		26	30				
						Jumlah Non PNS	orang			3				
						Jumlah Pakain Kerja	unit							
						Jumlah retribusi kebersihan	bulan			12				
						Jumlah Satpam dan Penjaga Malam	orang			14				
						Jumlah Tenaga Administrasi	orang			3				
						Jumlah Tenaga Kebersihan	orang			10				
						Jumlah Tenaga Teknis	orang			2				
3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	retribusi kebersihan	bulan		100		100			

Kode Rekening	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATJIAN	2020	2021	2022	2023	2024						
				REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%				
3	27	01	2.30	02	Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional roda 4 yang dipelihara	unit		18	18	225			
						Jumlah kendaraan dinas operasional roda 2 yang dipelihara	unit			19				
						Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara perizinan/nya roda 2	unit			413				
						Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara perizinan/nya roda 4	unit			14				
						Jumlah penggantian ST/ek Roda 2	unit			40				
						Jumlah penggantian STNK roda 4	unit			4				
3	27	01	2.09	08	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	unit		1	4	11			
						Jumlah ruangan kantor yang dipelihara	paket			1				
3	27	01	2.09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah AC yang dipelihara	unit		60	73	60			
						Jumlah alat rumah tangga yang dipelihara	unit			8	4			
						Jumlah jaringan listrik yang dipelihara	unit			1	1			
						Jumlah jaringan PAM yang dipelihara	unit			1	1			
						Jumlah jaringan telepon yang dipelihara	unit			1	1			
						Jumlah komputer yang dipelihara	unit			125	130			
						Jumlah printer yang dipelihara	unit			30	30			
						Jumlah router yang dipelihara	unit			1	1			
						Jumlah sub sistem yang dipelihara	unit			2	2			

Kode Rekening	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
				REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
		Jumlah wireless yang dipelihara	unit			3	3			
3	27 02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	ton/ha					6,84	7,72	112,87
3	27 02 2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	ha					55,612	97,478	98,65
3	27 02 2.01 01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	laporan					1	1	100,00
		Jumlah pestisida yang disalurkan kepada kelompok tani	jenis					1	1	
		Jumlah pupuk non subsidi yang disalurkan kepada kelompok tani	liter					38.222	38.222	
3	27 02 2.01 02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	laporan					12	12	100,00
		Jumlah bantuan alat dan mesin pertanian	unit					71	71	
3	27 02 2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewarstegan Kabupaten/Kota	komoditas					3	3	100,00
3	27 02 2.02 01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman (UPT Pertanian WII II)	VUB					1	1	100,00
		Jumlah bibit tanaman pelawija yang dikembangkan	kg					1.000	1000	
3	27 02 2.02 04	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman (UPT Pertanian WII V)	VUB					2	2	100,00
		Jumlah bibit sayuran siap edar								
		Jumlah produksi bibit tanaman obat	polybag					3.000	3000	
		Jumlah produksi bibit tanaman sayur (musa tanam 2 bulan)	pohon					250	250	
		Jumlah produksi bibit tanaman sayur dalam polybag	polybag					20.000	20000	
3	27 02 2.02 05	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman (UPT Pertanian WII VIII)	VUB					2	2	100,00
		Jumlah bibit tanaman perkebunan yang bersertifikat								
		Jumlah bibit tanaman perkebunan yang dipelihara sampai siap edar	pohon					20.190	20190	
		Jumlah bibit tanaman perkebunan yang dipelihara selama 4 bulan	pohon					27.000	27000	

Kode Rekening					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
								REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
3	27	02	2.02	05	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman (UPT Pertanian Wil X)	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	VUB					3	3	100,00
						Jumlah bibit tanaman buah yang dikembangkan	batang					3.500	3500	
						Jumlah bibit tanaman hias yang dikembangkan	batang					500	500	
3	27	02	2.02	07	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman (UPT Pertanian Wil X)	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	VUB					2	2	99,42
						Jumlah benih padi bersertifikat	ton					60	60,36	
						Produksi benih seluas 12 Ha dengan masa pemeliharaan dan panen periode Jan-Mar 2024	ton					35	39,30	
						Produksi benih seluas 12 Ha untuk masa tanam, pemeliharaan, dan panen periode April-September 2024	ton					25	21,06	
						Luas produksi benih dengan masa tanam dan pemeliharaan periode Okt-Das 2024	Ha					12	12	
3	27	02	2.02	08	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Tanaman (UPT Pertanian Wilayah III)	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	dokumen					1	1	143,59
						Jumlah UPJA yang dibina	UPJA					13	13	
						Jumlah alat-alat yang dipelihara/diperbaiki	unit					20	60	
3	27	02	2.02	09	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Tanaman (UPT Pertanian Wilayah VI)	Jumlah pelaksanaan peningkatan kualitas SDG Hewan/Tanaman	dokumen					1	1	138,10
						Jumlah UPJA yang dibina	UPJA					14	14	
						Jumlah alat-alat yang dipelihara/diperbaiki	unit					20	60	
3	27	02	2.02	11	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Tanaman (UPT Pertanian Wilayah X)	Jumlah pelaksanaan peningkatan kualitas SDG Hewan/Tanaman	dokumen					1	1	106,48
						Jumlah UPJA yang dibina	UPJA					18	18	
						Jumlah alat-alat yang dipelihara/diperbaiki	unit					38	43	
3	27	02	2.02	03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	dokumen					1	1	100,00
						Jumlah sarana perbenihan/bembibitan	jenis					5	5	
3	27	43			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase pemenuhan prasarana pertanian	%					31,94	19,44	60,88
3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah data potensi pengembangan prasarana pertanian	dokumen					3,00	3	100,00
3	27	03	2.01	01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B	Jumlah Dokumen Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola	dokumen					1	1	100,00

Kode Rekening					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
								REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	$11 = (10/9) \times 100\%$
3	27	03	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	laporan					1	1	100,00
3	27	03	2.01	04	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Jumlah Dokumen Actionplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	dokumen					1	1	100,00
3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian yang terbangun dan terpelihara	unit					14	14	100,00
3	27	03	2.02	01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	unit					9	9	100,00
					Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	unit					-	0	0,00
3	27	03	2.02	03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	unit					2	2	100,00
3	27	03	2.02	04	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Part	Jumlah Dam Part yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	unit					2	2	100,00
3	27	03	2.02	05	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	unit					-	0	0,00
3	27	03	2.02	00	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	unit					1	1	100,00
3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase luas lahan pertanian yang diasuransikan untuk meminimalkan resiko bencana pertanian	%					22,24	26,68	120,00
3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah cakupan luas lahan pengendalian dan penanganan bencana pertanian	ha					12.000	11.999,80	100,00
3	27	05	2.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (UPT Pertanian Wilayah I)	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	ha					200	200	100,00
						Jumlah gerakan pengendalian OPT dan sarana pendukungnya	gerakan					14	14	
						Jumlah lokasi disseminasi teknologi pengendalian OPT	kelompok tani					12	12	
3	27	05	2.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (UPT Pertanian Wilayah XII)	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	ha					500	500	100,00
						Jumlah gerakan pengendalian OPT dan sarana pendukungnya	gerakan					20	20	
						Jumlah lokasi disseminasi teknologi pengendalian OPT	kelompok tani					15	15	
3	27	05	2.01	02	Peranganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	ha					12.000	11999,80	100,00

Kode Rekening	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024					
				REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)			
				5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%			
		Terseleenggaranya bimtek SOP Pendampingan SL	Orang					32	32				
		Terlaksananya money penerima hibah kompetisi program YESS	Lokasi					17	17				
		Terlaksananya rapat koordinasi program YESS	Kali					1	1				
3	27	07	2.01	05	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kecamatan	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	unit				2	2	100,00
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	%				100	100,00	100,00
3	27	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pedoman kinerja Perangkat Daerah yang tersedia	dokumen				43	43	100,00
3	27	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen				10	10	100,00
3	27	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen				1	1	100,00
3	27	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen				2	2	100,00
3	27	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dokumen				1	1	100,00
3	27	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	dokumen				2	2	100,00
3	27	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan				10	10	100,00
3	27	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan				17	17	100,00
							aplikasi				-	0	
3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Tersusun Dengan Baik	%				100	100	100,00
3	27	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan				231	231	100,00
3	27	01	2.02	03	Pelaksanaan Peratrusahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Peratrusahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen ajuan bulanan				12	12	100,00
3	27	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	dokumen				2	2	100,00

Kode Rekening					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
								REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	$11 = (10/9) \times 100\%$
3	27	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan					1	1	100,00
3	27	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	dokumen					1	1	100,00
3	27	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan					12	12	100,00
3	27	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	dokumen					1	1	100,00
3	27	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana Dengan Baik	%					100	100	100,00
3	27	01	2.03	01	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan					1	1	100,00
3	27	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Aparatur yang Terlaksana Dengan Baik	%					100	100	100,00
3	27	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	unit					-	0	0,00
3	27	01	2.05	02	Pengadaan Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	paket					-	0	0,00
3	27	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	dokumen					-	0	0,00
						Jumlah sistem pendataan dan pengolahan data kepegawaian yang dibuat	sisitem					-	0	0,00
3	27	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	dokumen					-	0	0,00
3	27	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang					350	350	100,00
3	27	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	orang					-	0	0,00
3	27	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang					-	0	0,00
3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelayanan Umum Terlaksana Dengan Baik	%					100	100	100,00
3	27	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket					1	1	100,00
3	27	01	2.06	02	Penyediaan Perakitan dan Perengkapan Kantor	Jumlah Paket Perakitan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan	paket					3	3	100,00

Kode Rekening	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024								
				REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%						
3	27	01	2.05	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket						0	0,00		
3	27	01	2.05	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket						2	2	100,00	
3	27	01	2.05	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket						2	2	100,00	
3	27	01	2.05	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	dokumen						1	1	100,00	
3	27	01	2.05	08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	laporan							12	12	100,00
3	27	01	2.05	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan							2	2	100,00
3	27	01	2.05	10	Penatausahaan Asip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Asip Dinamis pada SKPD	dokumen							1	1	100,00
3	27	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	dokumen							0	0,00	
						Jumlah sistem asiparis berbasis elektronik	system							0		
3	27	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana Dengan Baik	%							100	100	100,00
3	27	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	unit							1	1	100,00
3	27	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit							0	0,00	
3	27	01	2.07	04	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit							0	0,00	
3	27	01	2.07	05	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit							224	224	100,00
3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana Dengan Baik	%							100	100	100,00
3	27	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan							12	12	100,00
3	27	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan							12	12	100,00
3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana Dengan Baik	%							100	100	100,00

Kode Rekening					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
								REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1					2	3	4	6	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
3	27	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perincian Kandaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit					78	178	100,00
3	27	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit					5	5	100,00
3	27	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	unit					282	282	100,00

TABEL 2.2
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH HINGGA TAHUN 2024

URUSAN / URSUR
 BIDANG URUSAN
 PERANGKAT DAERAH

: PILIHAN
 : PERTANIAN
 : DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
			REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (9/8)x100%
1	Produksi padi	Ton GKG	477.255	477.255	-	-	-	-	-
2	Produksi palawija	Ton	144.424	144.424	-	-	-	-	-
3	Produksi sayuran	Ton	112.493	112.493	-	-	-	-	-
4	Produksi buah-buahan	Ton	106.555	106.555	-	-	-	-	-
5	Produksi tanaman perkebunan	Ton	8.602	8.602	-	-	-	-	-
6	Produksi tanaman hias bunga	Tangkai	4.060.663	4.060.663	-	-	-	-	-
7	Produksi tanaman hias daun indah	Pohon	750.257	750.257	-	-	-	-	-
8	Produksi tanaman obat	Ton	9.539	9.539	-	-	-	-	-
9	Produktivitas padi sawah	Ku/Ha	63	62,53	-	-	-	-	-
10	Produktivitas padi gogo	Ku/Ha	34	34,36	-	-	-	-	-
11	Produktivitas palawija	Ku/Ha	173	172,91	-	-	-	-	-
12	Produktivitas sayuran	Ku/Ha	128	128,32	-	-	-	-	-
13	Kontribusi sektor pertanian (total) terhadap PDRB harga berlaku	%	-	-	-	-	-	-	-
14	NTP	%	-	-	-	-	-	-	-
15	Persentase rata-rata nilai tambah tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	%	7	6,84	-	-	-	-	-
16	Jumlah kelompok tani yang terhentuk	Kelompok	7	7,32	-	-	-	-	-
17	Produksi pertanian lokal yang berdaya saing	Ton	-	877.313	857.242	828.067	-	-	-
18	Produksi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	Ton	-	-	-	-	748.135	802.441	107,26

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
			REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (9/8)x100%
19	Produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Ton/Ha	-	6,74	6,90	6,65	6,74	6,46	95,85
20	Persentase SDM pertanian yang meningkat kompetensinya	%	-	2,42	1,71	3,00	1,78	1,87	105,06

Petunjuk pengisian :

Kolom (1) : Diisi dengan nomor urut

Kolom (2) : Diisi dengan indikator kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam Perubahan Renstra tahun 2018-2023 (Lihat Tabel 8.9b pada Bab 6 P-RPJMD)

Kolom (3) : Diisi dengan satuan indikator

Kolom (4) : Diisi dengan capaian IKU tahun 2020

Kolom (5) : Diisi dengan capaian IKU tahun 2021

Kolom (6) : Diisi dengan capaian IKU tahun 2022

Kolom (7) : Diisi dengan capaian IKU tahun 2023

Kolom (8) : Diisi dengan capaian IKU tahun 2024

Kolom (9) : Diisi dengan target IKU tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Perubahan Renstra 2024-2026

Kolom (10) : Diisi dengan realisasi IKU tahun 2024

Kolom (11) : Diisi dengan persentase tingkat capaian realisasi terhadap target tahun 2024

TABEL 2
REVIEW TERHADAP RENJA TAHUN 2025
KABUPATEN BOGOR

URUSAN JUMBUH
BIDANG URUSAN
PERANGKAT DAERAH

-REJAN
-PERTAMA
-URUSAN TANAMAN HAYATI HORTIKULTURA DAN PERKEBUNGAN

NO	REJAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING	
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Kabupaten Bogor	Persentase sarana pertanian yang dapat dipenuhi	%	16,93	23.315.465.673	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Kabupaten Bogor	Persentase sarana pertanian yang dapat dipenuhi	%	16,93	66.728.933.828		
	Penggunaan Penggunaan Sarana Pertanian	Kabupaten Bogor	Jumlah luas areal tanam	ha	85.471,27	12.257.333.194	Penggunaan Penggunaan Sarana Pertanian	Kabupaten Bogor	Jumlah luas areal tanam	ha	85.471,27	40.390.820.424		
	Penggunaan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Kabupaten Bogor	Jumlah Penggunaan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas	laporan	1,00	6.064.799.418	Penggunaan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Kabupaten Bogor	Jumlah Penggunaan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas	laporan	1	12.132.817.664		
			Jumlah pestisida yang dibutuhkan	jenis	3,00				Jumlah pestisida yang dibutuhkan	jenis	3			
			Jumlah pupuk non subsidi yang disalurkan kepada kelompok tani	ha	5.340,00				Jumlah pupuk non subsidi yang disalurkan kepada kelompok tani	ha	5,34			
			Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Verpal Pupuk Subsidi	orang	120,00				Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Verpal Pupuk Subsidi	orang	120			
			Jumlah pupuk organik non subsidi yang disalurkan kepada kelompok tani	ha	5.340,00				Jumlah pupuk organik non subsidi yang disalurkan kepada kelompok tani	ha	5,396			
			Jumlah kapur pertanian non subsidi yang disalurkan kepada kelompok tani upaya perbaikan lahan pertanian	ha	5.340,00				Jumlah kapur pertanian non subsidi yang disalurkan kepada kelompok tani upaya perbaikan lahan pertanian	ha	5,34			
			Jumlah sosialisasi pertanian organik	orang	100,00				Jumlah sosialisasi pertanian organik	orang	100			
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kabupaten Bogor	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	laporan	1,00	6.192.533.778			Jumlah luas lahan pertanian organik	ha	10			
			Jumlah bantuan alat dan mesin pertanian	jenis	14,00				Jumlah Yakinnas Kebutuhan Pupuk dan Pestisida Pemangkar Benih Padi Unggul Bersertifikat	ha	200			
				unit	134,00			Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kabupaten Bogor	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	laporan	1	28.458.808.760	
	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Perbentuk Biji/Benda (LPT, WB II)	Kabupaten Bogor	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benda yang diperlengkapi	ton	1,00	508.258.900			Jumlah bantuan alat dan mesin pertanian	jenis	14			

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	RENJA				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							CATATAN PENTING
			INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			Jumlah Perbenihan Tanaman 0,5 Ha untuk Produksi Benih Masa Tanam Feb-April (MT I)	ton	0,50					unit	845			
			Jumlah Perbenihan Tanaman 0,5 Ha untuk Produksi Benih Masa Tanam Juli-September (MT III)	ton	0,50					ton	260			
			Jumlah benih pada MT I yang diproses sertifikasi (Mei-Juni)	ton	0,50					cluster komoditas	-	16.134.107,101		
			Jumlah benih pada MT II yang diproses sertifikasi (Okt-Nov)	ton	0,50					ton	1	308.258.000		
			Jumlah traktor roda 2	unit	1,00						1	-		
	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih (UPT WII X)	Kabupaten Bogor	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	ton	40,00	1.100.098.180				Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih	ton	1	-	
			Produk benih seluas 12 Ha dengan masa pemeliharaan dan panen periode Jan-Mar	ton	35,00					Jumlah Perbenihan Tanaman 0,5 Ha untuk Produksi Benih Masa Tanam Juli-September (MT III)	ton	1	-	
			Produk benih seluas 12 Ha untuk masa tanam, pemeliharaan, dan panen periode April-September	ton	25,00					Jumlah benih pada MT I yang diproses sertifikasi (Mei-Juni)	ton	1	-	
			Luas lahan pembenihan dengan masa tanam dan pemeliharaan periode Okt-Des	Ha	12,00					Jumlah benih pada MT II yang diproses sertifikasi (Okt-Nov)	ton	1	-	
			Luas lahan pembenihan dengan masa tanam dan pemeliharaan periode Okt-Des	Ha	12,00					Jumlah traktor roda 2	unit	1	-	
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (UPT Pertanian Wilayah III)	Kabupaten Bogor	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDO Hewan/Tanaman	kegiatan	1,00	780.953.650	Peningkatan Keaktifan dan Kelesterian SDO Hewan/Tanaman (UPT Pertanian WII V) UPT (Dinamiskulasi Perikanan)	Kabupaten Bogor	Jumlah SDO Hewan/Tanaman yang Dilakukan Seleksian dan	VUB	2	847.325.478		
			Jumlah UPJA yang dibina	UPJA	15,00					pelestarian dan	polybag	1,5	-	
			Jumlah alatiran yang diperbaiki/diperbaiki	unit	55,00					bibit tanaman obat	polybag	20	-	
			Jumlah mobil bengkel keliling	unit	-					Jumlah produksi bibit tanaman sayur	polybag	10	-	
			Jumlah suku cadang yang difasilitasi	jenis	10,00					Jumlah produksi bibit tanaman cabai	polybag	10	-	
			Jumlah alatiran untuk brigade	unit	10,00					penyediaan bibit	jenis	1	-	
			Jumlah biotek kolonial tanaman	unit	5,00					penyediaan bibit	unit	1	-	
			Jumlah biotek kolonial tanaman	unit	5,00					Pembangunan Green	unit	1	-	
			Jumlah pelaksanaan peningkatan kualitas SDO Hewan/Tanaman	kegiatan	1,00	857.713.099	Peningkatan Keaktifan dan Kelesterian SDO Hewan/Tanaman (UPT Perikanan WII V) UPT	Kabupaten Bogor	Rehabilitasi Tanaman Obat	jenis	3	-		
			Jumlah UPJA yang dibina	UPJA	14,00					Jumlah SDO Hewan/Tanaman yang Dilakukan Seleksian dan	VUB	3	925.000.000	
			Jumlah alatiran yang diperbaiki/diperbaiki	unit	50,00					Jumlah bibit tanaman	jenis	28	-	
			Jumlah suku cadang yang difasilitasi	jenis	7,00					Jumlah bibit tanaman	jenis	38	-	
			Jumlah sarana untuk brigade	unit	2,00					Jumlah kultivator	unit	1	-	
			Jumlah sarana untuk brigade	unit	2,00					Jumlah SDO Hewan/Tanaman	VUB	2	784.002.148	

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	REKAP				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
			INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah bibit teknis alatiran	kef	3,00				Jumlah bibit	poton	3		
			Jumlah modul bengkel ladang	unit	1,00				Jumlah buah yang				
			Jumlah alat peraga/latihan	jenis	14,00				Jumlah bibit tanaman buah yang	pot/polybag	2,7		
			Jumlah pelaksanaan peningkatan kualitas SDG Hewan/Tanaman	dokumen	1,00	750.000.000			Jumlah bibit tanaman buah yang bersertifikat	poton	2		
	Pendampingan Pengurusan Sarana Pendukung Pertanian (UPT W0 Q)	Kabupaten Bogor	Jumlah pelaksanaan peningkatan kualitas SDG Hewan/Tanaman	dokumen	1,00	750.000.000		Pelaksanaan Bantu Bersertifikat Tanaman Pangan Diikuti Hib/Bebibit Hib/Bebibit UPT W0 XI UPT	Kabupaten Bogor	Jumlah bibit tanaman pangan bersertifikat	ton	40	2.400.000.000
			Jumlah URJA yang dibina	URJA	18,00				Jumlah bibit/besih				
			Jumlah alatiran yang dipelihara/diperbaiki	unit	50,00				Jumlah Produk	ton	35		
			Jumlah saku cadang dan alat peraga/latihan	jenis	9,00				Jumlah etilias 12 ltr	ton	25		
			Jumlah alatiran untuk brigade	unit	3,00				Jumlah Produk	ton	25		
			Jumlah bibit teknis alatiran	kef	3,00				Jumlah Lusa lahan perkebunan dengan	ha	12		
			Jumlah modul bengkel ladang	unit	1,00				Jumlah Produk	ton	60		
			Jumlah bibit teknis alatiran	kef	3,00			Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman UPT	Kabupaten Bogor	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan	kepon	1	780.952.067
			Jumlah modul bengkel ladang	unit	1,00					Jumlah URJA yang dibina	URJA	18	
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tanaman, dan Mikro Organisme Kawasan Kabupaten/Sota	Kabupaten Bogor	Jumlah komoditas buah/bibit tanaman perikanan yang bersertifikat	cluster komoditas	3,00	10.958.132.477				Jumlah alatiran yang dipelihara/diperbaiki	unit	65	
										Jumlah saku cadang yang difasilitasi	jenis	13	
	Penjalaran Kesurutan dan Kelelahan SDG Hewan/Tanaman (UPT Pertanian W0 V)	Kabupaten Bogor	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	VUB	2,00	847.325.478				Jumlah alatiran untuk brigade	unit	10	
			Jumlah produk bibit tanaman obat dalam polybag	polybag	1.000,00					Jumlah bibit teknis alatiran	kef	5	
			Jumlah produk bibit tanaman sayur dalam polybag	polybag	25.000,00			Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (UPT W0 VI) (UPT Mektan Drainase)	Kabupaten Bogor	Jumlah pelaksanaan peningkatan kualitas SDG Hewan/Tanaman	dokumen	1	857.715.000
			Jumlah produk bibit tanaman cabai pengadaban aprodi pada APDIP 2023	polybag	10.000,00					Jumlah URJA yang dibina	URJA	14	
			Jumlah perangkaan buah tanaman obat (usia 5 bulan)	jenis	1,00					Jumlah alatiran yang dipelihara/diperbaiki	unit	50	
	Penjalaran Kesurutan dan Kelelahan SDG Hewan/Tanaman (UPT Pertanian W0 VII)	Kabupaten Bogor	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	VUB	3,00	633.000.000				Jumlah saku cadang yang difasilitasi	jenis	7	
			Jumlah bibit tanaman perkebunan yang dipelihara sampai siap jual	poton	25.000,00					Jumlah alatiran untuk brigade	unit	9	

NO	PROGRAM/KEGIATAN/USUL KEMASAN	LOKASI	FORMULA				PAGU BUDGET (Rp)	PROGRAM KEGIATAN/USUL KEGIATAN	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
			INDIKATOR KINERJA	BATASAN	TARGET CAPAIAN				LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BATASAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DAMA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			Jumlah bibit tanaman perkebunan yang dipelihara selama 1 tahun	potas	30.000,00				Jumlah bibit tanaman perkebunan	kg		3		
			Jumlah buku laporan	perk	1,00				Jumlah buku laporan	unit		1		
	Peningkatan Kualitas dan Kesehatan SDG Hewan/Tanaman (UPT Perikanan WPT)	Kabupaten Bogor	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang dilakukan Pektokrifan dan Pemurnian	kg/B	2,00	783.600,00			Jumlah alat perbagunan	jenis		14		
			Jumlah bibit tanaman buah yang dibudidayakan (Nyutak)	potas	2.500,00		Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (UPT WPT)	Kabupaten Bogor	Jumlah pelaksanaan peningkatan kualitas SDG Hewan/Tanaman	dekawat		1	750.000,000	
			Jumlah bibit tanaman ikan yang dibudidayakan	pot/polybag	2.800,00				Jumlah UPIA yang dibina	UPIA		14		
	Pemeliharaan SDG Hewan/Tanaman	Kabupaten Bogor	Jumlah Pemeliharaan SDG Hewan/Tanaman	dekawat	2,00	4.205.276,943			Jumlah tindakan yang dipelihara/diperbaiki	unit		60		
			Jumlah bibit padi yang dipelihara	kg	5.000,00				Jumlah buku kandang dan alat perbagunan	jenis		9		
			Jumlah bibit cabai yang dipelihara	kg	340,00				Jumlah sarana untuk kandang	unit		3		
			Jumlah bibit yang dipelihara	kg	340,00				Jumlah bibit sapi dan kambing	kg		3		
			Jumlah bibit alpukat yang dipelihara	kg	430,00				Jumlah bibit perbagunan	unit		7		
			Jumlah bibit jeruk yang dipelihara	kg	505,00		Pemeliharaan SDG Hewan/Tanaman	Kabupaten Bogor	Jumlah Pemeliharaan SDG Hewan/Tanaman	dekawat		2	8.284.854,318	
			Jumlah bibit pala yang dipelihara	kg	1,00				Jumlah bibit padi yang dipelihara	kg		3.773		
			Jumlah bibit kopi yang dipelihara	kg	70,00				Jumlah bibit cabai yang dipelihara	kg		137		
			Jumlah bibit mangga yang dipelihara	kg	170,00				Jumlah bibit yang dipelihara	kg		137		
			Jumlah bibit jambu air yang dipelihara	kg	12,50				Jumlah bibit alpukat yang dipelihara	kg		20		
			Jumlah bibit kesang yang dipelihara	kg					Jumlah bibit jeruk yang dipelihara	kg		45		
			Jumlah bibit mangga yang dipelihara	kg	140,00				Jumlah bibit pala yang dipelihara	kg		20		
			Jumlah bibit cabai yang dipelihara	kg	68,00				Jumlah bibit kopi yang dipelihara	kg		24		
			Jumlah bibit jagung hibrida yang dipelihara	kg	306,00				Jumlah bibit mangga yang dipelihara	kg		6		
			Jumlah bibit jagung palang yang dipelihara	kg	49,00				Jumlah bibit jambu air yang dipelihara	kg		0		
			Jumlah bibit pisang yang dipelihara	kg	110,00				Jumlah bibit mangga yang dipelihara	kg		140		
			Jumlah bibit mentimun yang dipelihara	kg	50,00				Jumlah bibit tomat yang dipelihara	kg		15		

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	REKRESI				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING	
			INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LDKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			Jumlah bibit kangkung yang disediakan	ha	50,00				Jumlah bibit jagung hibrida yang disediakan	ha	128			
			Jumlah bibit casim yang disediakan	ha	40,00				Jumlah bibit pisang yang disediakan	ha	20			
			Jumlah bibit bayam yang disediakan	ha	40,00				Jumlah bibit casim yang disediakan	ha	24			
			Jumlah bibit kangkung yang disediakan	ha	40,00				Jumlah bibit bayam yang disediakan	ha	22			
			Jumlah bibit terung yang disediakan	ha	40,00				Jumlah bibit kangkung yang disediakan	ha	24			
			Jumlah bibit tomat yang disediakan	ha	40,00				Jumlah bibit Krisan yang disediakan	batang	10			
			Jumlah bibit mentimun yang disediakan	ha	40,00				Jumlah bibit agromema yang disediakan	batang	500			
			Jumlah bibit Krisan yang disediakan	batang	10.000,00				Jumlah bibit anggrek yang disediakan	batang	15			
			Jumlah bibit agromema yang disediakan	batang	500,00				Jumlah bibit talas yang disediakan	ha	1			
			Jumlah bibit anggrek yang disediakan	batang	500,00				Jumlah bibit jabe yang disediakan	ha	1			
			Jumlah benih padi yang disediakan (mg prioritas bupati)	kg	375.800,00				Jumlah Pasokan Benih, pendampingan dan sertifikasi Pemangkar Benih Padi Unggul Berautofikasi	ha	269			
			Jumlah benih perangkar benih	orang	100,00			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PERKEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Kabupaten Bogor	Pemetaan prasarana pertanian yang dapat dipenuhi	%	17,55	47.054.114.732	
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PERKEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Kabupaten Bogor	Persentase prasarana pertanian yang dapat dipenuhi	%	17,55	15.711.177.287	Perencanaan Prasarana Pertanian	Kabupaten Bogor	Jumlah informasi pengembangan prasarana pertanian	dokumen	3	600.000.000		
	Pengembangan Prasarana Pertanian	Kabupaten Bogor	Jumlah informasi pengembangan prasarana pertanian	dokumen	3,00	805.052.475	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B	Kabupaten Bogor	Jumlah Dokumen Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B yang dikelola	dokumen	1	300.000.000		
	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B	Kabupaten Bogor	Jumlah Dokumen Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B yang dikelola	dokumen	1,00	316.369.590	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Kabupaten Bogor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	laporan	1	100.000.000		
	Jumlah pelaksanaan revisi perda LP2B su 7 tahun 2019		Jumlah pelaksanaan revisi perda LP2B su 7 tahun 2019	laporan	sinkronisasi KP2B Prov Jabar		Perencanaan Action Plan Pengembangan Prasarana, Bicara, Kawasan Pertanian	Kabupaten Bogor	Jumlah Dokumen Actionplan Pengembangan Prasarana, Bicara, Kawasan, dan Koordinasi Pertanian	dokumen	1	200.000.000		

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	REKAP				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING	
			INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Kelembagaan dan Sosialisasi Program Pendukung Pertanian lainnya	Kabupaten Bogor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pendukung Pertanian lainnya	laporan	1,00	168.730.000	Pengendalian dan Pemantauan Kawasan Pertanian	Kabupaten Bogor				-	150.000.000	
	Penyusunan Arah Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Kabupaten Bogor	Jumlah Dokumen Arahplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan, dan Komoditas Pertanian	dokumen	1,00	199.993.975								
	Pengendalian dan Pemantauan Kawasan Pertanian	Kabupaten Bogor	Luas kawasan pertanian yang termonitoring			150.000.000	Pembangunan Prasarana Pertanian	Kabupaten Bogor	Jumlah prasarana pertanian yang terbangun	unit	35	46.454.114.732		
	Pembangunan Prasarana Pertanian	Kabupaten Bogor	Jumlah prasarana pertanian yang terbangun	unit	35,00	14.876.083.512	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Kabupaten Bogor	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	unit	77	20.000.550.353		
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Kabupaten Bogor	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	unit	19,00	3.066.185.570			Jumlah Fasilitas bangunan Gudang dan Pengering Benih untuk Pemangkar Benih Padi Unggul Benerdiklat	Kelompok Tani	20	-		
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Kabupaten Bogor	Jumlah Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	unit	6,00	3.590.000.000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Kabupaten Bogor	Jumlah Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	unit	39	9.900.000.000		
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Perit	Kabupaten Bogor	Jumlah Dam Perit yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	unit	3,00	863.470.846	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Perit	Kabupaten Bogor	Jumlah Dam Perit yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	unit	3	792.136.379		
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pisu Air	Kabupaten Bogor	Jumlah Pisu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	unit	1,00	73.000.000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pisu Air	Kabupaten Bogor	Jumlah Pisu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	unit	1	73.000.000		
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Kabupaten Bogor	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	unit	5,00	9.223.427.393	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Kabupaten Bogor	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	unit	37	9.518.428.000		
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PERANGGULANGAR BENCANA PERTANIAN	Kabupaten Bogor	Persentase penguasaan Dampak Perubahan Iklim terhadap pertanian	%	37,95	2.233.740.452			Jumlah Fasilitas Gudang dan Bangunan Pengerig untuk Pemangkar Benih Padi Unggul Benerdiklat	Kelompok Tani	20	-		
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Kabupaten Bogor	Jumlah cakupan luas lahan pengendalian dan penanganan bencana pertanian	ha	3.500,00	2.233.740.452	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PERANGGULANGAR BENCANA PERTANIAN	Kabupaten Bogor	Persentase penguasaan Dampak Perubahan Iklim terhadap pertanian	%	37,95	2.233.740.482		
	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (LPT 92 II)	Kabupaten Bogor	Jumlah luas serangannya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang dikendalikan	Ha	450,00	480.000.000	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Kabupaten Bogor	Jumlah cakupan luas lahan pengendalian dan penanganan bencana pertanian	ha	10	2.233.740.452		

NO	PROGRAM/LOKASI/KEGIATAN	LOKASI	RENYAI				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							CATATAN PENTING
			INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			Jumlah gerakan pengabdian OPT dan sarana pendukungnya	Desakan	7.00		Pengabdian Organisasi Penggerak Terpadu (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (OPT WII/ IPT Protokol Parung Panjang)	Kabupaten Bogor	Jumlah Area Tanaman Organisme Penggerak Terpadu (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang dikembangkan	Ha	450	480.000.000		
			Jumlah biaya dimanfaatkan untuk pengembangan OPT	Kelompok Tani	7.00				Jumlah gerakan pengabdian OPT dan sarana pendukungnya	Desakan	7			
			Jumlah penerapan pengabdian OPT dan sarana pendukungnya	Kelompok Tani	7.00				Jumlah lahan diembal teknologi pengabdian OPT	Kelompok Tani	7			
			Jumlah jaring burung yang dilepas	Unit	240,00				Jumlah penerapan pengabdian OPT dan sarana pendukungnya	Kelompok Tani	7			
	Pengabdian Organisasi Penggerak Terpadu (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (OPT WII/ IPT)	Kabupaten Bogor	Jumlah Area Tanaman Organisme Penggerak Terpadu (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang dikembangkan	Ha	500,00	596.297.057			Jumlah jaring burung yang dilepas	Unit	240			
			Jumlah gerakan pengabdian OPT dan sarana pendukungnya	Desakan	15,00		Pengabdian Organisasi Penggerak Terpadu (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (OPT WII/ IPT Protokol Cariuk)	Kabupaten Bogor	Jumlah jaring burung yang dilepas	Ha	500	596.297.057		
			Jumlah lahan diembal teknologi pengabdian OPT	Kelompok Tani	15,00				Jumlah gerakan pengabdian OPT dan sarana pendukungnya	Desakan	15			
			Jumlah penerapan pengabdian OPT dan sarana pendukungnya	Kelompok Tani	15,00				Jumlah lahan diembal teknologi pengabdian OPT	Kelompok Tani	15			
			Jumlah jaring burung yang dilepas	Unit	300,00				Jumlah penerapan pengabdian OPT dan sarana pendukungnya	Kelompok Tani	15			
	Pembinaan Kelompok Perikanan Air (DPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Kabupaten Bogor	Jumlah Area Terdampak Perikanan Air (DPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang ditangani	Ha	20.000,00	1.067.471.866			Jumlah jaring burung yang dilepas	Unit	300			
			Jumlah lahan mibagau (M)	Desakan	1,00		Pembinaan Kelompok Perikanan Air (DPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Kabupaten Bogor	Jumlah Area Terdampak Perikanan Air (DPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang ditangani	Ha	10	1.067.471.866		

NO	REKOR						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Pemangulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Kabupaten Bogor	Jumlah pemangulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan hortikultura dan perkebunan	leseran	1,00	89.971.500			Jumlah lejan wilayah DPT	dokumen	1	-	
			Jumlah peserta rakor dan sosialisasi pemangulangan pasca bencana pertanian	orang	300,00		Pemangulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Kabupaten Bogor	Jumlah pemangulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan hortikultura dan perkebunan	laporan	1	89.971.500	
	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Kabupaten Bogor	Persentase pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan pelayanan pertambangan teknis lain usaha pertanian	%	28-40	2.820.999.854			Jumlah peserta rakor dan sosialisasi pemangulangan pasca bencana pertanian	orang	600	-	
	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Mengikat Ushahnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bogor	Jumlah kesulitan pendampingan pelaku usaha dalam pengajuan izin usaha pertanian	pelaku usaha	249,00	2.820.999.854	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Kabupaten Bogor	Persentase pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan pelayanan pertambangan teknis lain usaha pertanian	%	28,4%	3.330.000.000	
	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Kabupaten Bogor	Jumlah Dek Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian (dok seram pertanian, dok monografi, buku saku, dan statistik perkebunan)	dokumen	4,00	550.000.000	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Mengikat Ushahnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bogor	Jumlah kesulitan pendampingan pelaku usaha dalam pengajuan izin usaha pertanian	pelaku usaha	249	3.330.000.000	
	Penilaian Kelengkapan dan Pemberian Perimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Kabupaten Bogor	Jumlah Penilaian Kelengkapan dan Pemberian Perimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	dokumen	1,00	1.330.000.000	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Kabupaten Bogor	Jumlah Dek Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian (dok seram pertanian, dok monografi, buku saku, dan statistik perkebunan)	dokumen	4	550.000.000	
			Jumlah kelompok tani yang mengajukan registrasi kebun komoditas hortikultura	pektan/pelaku usaha	10,00		Penilaian Kelengkapan dan Pemberian Perimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Kabupaten Bogor	Jumlah Penilaian Kelengkapan dan Pemberian Perimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	dokumen	1	1.330.000.000	
			Jumlah pelaku usaha perkebunan	perusahaan	10,00				Jumlah kelompok tani yang mengajukan registrasi kebun komoditas hortikultura	pektan/pelaku usaha	10	-	
			Jumlah pelaku usaha tanaman pangan (beras ASN)	pektan	13,00				Jumlah pelaku usaha perkebunan	perusahaan	10	-	
			Jumlah pameran	kali	2,00				Jumlah pelaku usaha tanaman pangan (beras ASN)	pektan	13	-	
			Jumlah pembinaan pektan kopi	pektan	10,00				Jumlah pameran	kali	2	-	
			Jumlah sertifikasi komoditas organik	pektan	3,00				Jumlah pembinaan pektan kopi	pektan	10	-	

NO	REKJA						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar dan lain-lain Usaha Pertanian (LPT W/3 IV)	Kabupaten Bogor	Jumlah ltrn Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	laporan	1,00	590.996.854			Jumlah vertifikasi komoditas organik	gelitas	3		
			Jumlah pelaku usaha yang dibina dan diawasi penerapan lain usahanya	pelaku usaha	120,00				Jumlah Fasilitas Irigasi Perangkar bertek Padi Unggul Bersertifikat	Kelompok Tani	20		
			Jumlah Penyelenggaraan Promosi/Pameran Komoditas Pertanian	kali	8,00		Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar dan lain-lain Usaha Pertanian (LPT W/3 IV)	Kabupaten Bogor	Jumlah ltrn Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	laporan	1	900.000.000	
			Jumlah pemberdayaan keluarga miskin	KK	7,00				Jumlah pelaku usaha yang dibina dan diawasi penerapan lain usahanya	pelaku usaha	120		
	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar dan lain-lain Usaha Pertanian (LPT W/3 V/2)	Kabupaten Bogor	Jumlah ltrn Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	laporan	1,00	350.000.000			Jumlah Penyelenggaraan Promosi/Pameran Komoditas Pertanian	kali	8		
			Jumlah Pelaku usaha yang dibina dan diawasi penerapan lain usahanya	pelaku usaha	80,00				Jumlah pemberdayaan keluarga miskin	KK	20		
			Jumlah Penyelenggaraan Promosi/Pameran Komoditas Pertanian	kali	8,00		Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar dan lain-lain Usaha Pertanian (LPT W/3 V/2)	Kabupaten Bogor	Jumlah ltrn Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	laporan	1	550.000.000	
	PROGRAM PERYULUHAN PERTANIAN	Kabupaten Bogor	Persentase peningkatan kompetensi SDM pertanian	%	1,98	8.073.340.492			Jumlah Pelaku usaha yang dibina dan diawasi penerapan lain usahanya	pelaku usaha	80		
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Kabupaten Bogor	Persentase peningkatan kemampuan kelas kelompok tani berdasarkan skor penilaian	%	53,50	8.073.340.492			Jumlah Penyelenggaraan Promosi/Pameran Komoditas Pertanian	kali	8		
	Peningkatan Kapasitas kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Kabupaten Bogor	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya	unit	13,00	2.043.087.425	PROGRAM PERYULUHAN PERTANIAN	Kabupaten Bogor	Persentase peningkatan kompetensi SDM pertanian	%	1,98	10.052.956.450	
			Jumlah Penyuluh Pertanian Swadaya yang terfasilitasi dalam pelaksanaan tugas	orang	190,00		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Kabupaten Bogor	Persentase peningkatan kemampuan kelas kelompok tani berdasarkan skor penilaian	%	53,50	10.052.956.450	
			Jumlah Fasilitas rapid response 2 minggu spp	kali	285,00		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Kabupaten Bogor	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya	unit	13	3.835.095.000	
			Jumlah penyuluh pertanian yang terfasilitasi dalam melaksanakan tugas	orang	190,00				Jumlah Penyuluh Pertanian Swadaya yang terfasilitasi dalam pelaksanaan tugas	orang	190		

NO	PROGRAM/LOKASI/TAHAP/KUALITAS KEBERATAN	LOKASI	REKOR				PAOU/INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/DURASI/NEGOTIASI	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
			INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	LOKASI			INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			Jumlah penyuluh pertanian dan kerentanan penyuluhan tingkat Desa yang efektif	paket	3,00				Jumlah penyuluh tingkat kecamatan 2 kabupaten BPP	paket	200			
			Jumlah penyuluh pertanian swasta yang efektif	orang	25,00				Jumlah penyuluh pertanian yang efektif tingkat kecamatan	orang	150			
			Jumlah peserta sosialisasi perhut PPK/organisasi penyuluhan tingkat Desa/kecamatan	orang	100,00				Jumlah peserta sosialisasi perhut PPK/organisasi penyuluhan tingkat Desa/kecamatan	orang	5			
			Jumlah peserta bimtek penyuluh pertanian	orang	30,00				Jumlah penyuluh pertanian swasta yang efektif tingkat kecamatan	orang	25			
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani & Perencanaan dan Desa	Kabupaten Bogor	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Dirangkai sebagai Koperasi	Kelompok tani	100,00	1.500.000,143			Jumlah peserta sosialisasi perhut PPK/organisasi penyuluhan tingkat Desa/kecamatan	orang	100			
			Jumlah pelatihan petani mengenai gapoktan, gapoktan, dan petani kelompok	paket	7,00				Jumlah peserta bimtek penyuluh pertanian	orang	30			
			Terdokumentasi baik untuk tingkat provinsi	petak/bekas	1.050,00		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Kabupaten Bogor	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Dirangkai sebagai Koperasi	Kelompok tani	100	2.400.000,000		
			Terdokumentasi baik tentang dokumen RDKK	kelompok	2.225,00				Jumlah pelatihan petani mengenai gapoktan, gapoktan, dan petani kelompok	paket	0			
			Terdokumentasi baik tentang laporan kerja kelompok provinsi	Kategori	7,00				Jumlah petani yang didokumentasi untuk tingkat provinsi	petak/bekas	1,05			
			Terdokumentasi baik tentang laporan kerja kelompok kabupaten	Kategori	21,00				Jumlah penyuluhan dokumentasi RDKK yang didokumentasi	kelompok	2,225			
			Terdokumentasi baik tentang laporan kerja kelompok provinsi	Angkatan	10,00				Jumlah pendampingan kerja kelompok provinsi yang didokumentasi	Kategori	7			
			Terdokumentasi baik tentang laporan kerja kelompok provinsi	kel	1,00				Jumlah pendampingan kerja kelompok kabupaten yang didokumentasi	Kategori	21			
	Pemantauan dan Peningkatan Serta dan Peningkatan Penyuluhan Pertanian	Kabupaten Bogor	Jumlah Baitan dan Peningkatan Penyuluhan Pertanian	unit	13,00	1.200.199.250			Jumlah pendampingan kerja kelompok provinsi yang didokumentasi	Angkatan	10			
			Jumlah Peningkatan dan Peningkatan Baitan Peningkatan Baitan	paket	1,00				Jumlah pendampingan kerja kelompok provinsi yang didokumentasi	Kategori	1			
			Jumlah Baitan, pada tahun AP2 yang terpublikasi	unit	1,00				Jumlah Baitan yang didokumentasi	Kategori	1			

NO	REKOR						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah Peningkatan Dana Penyuluh/Koordinator yang terlaksana	HOK	650,00				Jumlah Fasilitas Identifikasi kelompok serta peningkatan kompetensi Penangkar Berah Padi Derasifikasi	Kelompok Tani	20		
			Jumlah Penerapan Model/teknologi Penyuluhan	Unit	40,00			Kabupaten Bogor	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	unit	13	1.665.363.000	
	Pembinaan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Kabupaten Bogor	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	unit	13,00	759.999.775			Jumlah lahan pemertanian RPP (Green House) yang terbangun dan terpelihara	unit	2		
	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Kabupaten Bogor	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	orang	196,00	398.516.425			Jumlah Demplot BPP yang terlaksana	unit	8		
			Jumlah peserta pelatihan spesifik lokalita	orang	357,00				Jumlah Pemadatan dan Pemeliharaan Lahan Pemertanian Dinas	hektar	1		
			Jumlah peserta bimbingan kepemimpinan kelompok petani	orang	36,00				Jumlah bangunan pada lahan APB yang terpelihara	unit	1		
	Pembentukan Kelompok Ekonomi Petani	Kabupaten Bogor	Jumlah Kelompok Ekonomi Petani yang dibentuk	unit	3,00	180.073.850			Jumlah Pemelanaan Dinas Penyuluh/Koordinator yang terlaksana	HOK	1,04		
			Jumlah pelatihan pemertanian dan pengembangan KEP	kegiatan	3,00			Kabupaten Bogor	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	unit	15	850.000.000	
			Jumlah pelaksanaan pembinaan KEP	kegiatan	3,00				Jumlah Sekolah Lapang Penangkar Berah Padi Unggul Derasifikasi	Unit	4		
	Diseminasi Informasi Teknik, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Kabupaten Bogor	Jumlah diseminasi informasi teknik, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian	dokumen	1,00	923.467.575		Kabupaten Bogor	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	orang	190	398.656.000	
			Jumlah peningkatan kapasitas petani milenial	kegiatan	6,00				Jumlah peserta pelatihan spesifik lokalita	orang	357		
	PROGRAM PERKURANG UTAMA PEMERTANIAN DASRAH KABUPATEN/KOTA	Kabupaten Bogor	Buku AKIP	Pust.	74,53	47.019.381.358			Jumlah peserta bimbingan kepemimpinan kelompok petani	orang	30		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Bogor	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Evaluasi Kinerja PD yang Berkualitas	%	100,00	418.358.068		Kabupaten Bogor	Pembentukan Kelompok Ekonomi Petani	unit	5	180.368.450	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Bogor	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	13,00	122.526.850			Jumlah pelatihan pemertanian dan pengembangan KEP	kegiatan	5		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kabupaten Bogor	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	1,00	27.571.550			Jumlah pelaksanaan pembinaan KEP	kegiatan	5		

NO	REKAPITULASI						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAQU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DAMA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kabupaten Bogor	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen	2,00	15.601.950	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomis dan Inovasi Pertanian	Kabupaten Bogor	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian	dokumen	1	923.170.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kabupaten Bogor	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dokumen	1,00	1.788.100			Jumlah peningkatan kapasitas petani milenial	kegiatan	19		
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kabupaten Bogor	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	dokumen	2,00	6.677.900	PROGRAM PEMBANGUNAN URBAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kabupaten Bogor	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Poin	74,50	47.336.072.885	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Bogor	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	laporan	14,00	172.655.118	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Bogor	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Evaluasi Kinerja PD yang Berkualitas	%	100	401.494.679	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Bogor	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	17,00	71.537.590	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Bogor	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	13	132.526.500	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Bogor	Persentase realisasi anggaran perangkat daerah	%	98,21	37.995.762.426	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kabupaten Bogor	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	1	13.031.530	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Bogor	Jumlah Orang yang Mendapat Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	281,00	37.573.913.104	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kabupaten Bogor	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen	2	15.601.950	
	Pelaksanaan Penastoruban dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten Bogor	Jumlah Dokumen Penastoruban dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen tahun	13,00	181.920.804	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kabupaten Bogor	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dokumen	1	1.788.420	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kabupaten Bogor	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	dokumen	2,00	34.999.868	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kabupaten Bogor	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	dokumen	2	6.678.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Bogor	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	1,00	1.749.900	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Bogor	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	laporan	14	170.330.298	

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	REKAP				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
			INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemertiksaan	Kabupaten Bogor	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemertiksaan dan Tindak Lanjut Pemertiksaan	dokumen	1,00	2.749.900	Kualifikasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Bogor	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	17	71.537.550	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trivulanan/Semesteran SKPD	Kabupaten Bogor	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Trivulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trivulanan/Semesteran SKPD	laporan	13,00	84.999.950	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Bogor	Persentase realisasi anggaran perangkat daerah	%	-	37.899.763.154	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisa Prognosa Realisasi Anggaran	Kabupaten Bogor	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisa Prognosa Realisasi Anggaran	dokumen	1,00	3.349.800	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Bogor	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	251	37.573.913.154	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kabupaten Bogor	Persentase Ases yang Terseksi sesuai dengan Ketentuan Pengelolaan Barang Milik Daerah	%	100,00	3.800.000	Pelaksanaan Pembelian/akuisisi dan Pengadaan/Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten Bogor	Jumlah Dokumen Pembelian/akuisisi dan Pengadaan/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen setiap bulanan	12	182.000.000	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten Bogor	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	2,00	3.800.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kabupaten Bogor	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	dokumen	2	35.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kabupaten Bogor	Persentase ASN yang Tertinggal Layanan Kepegawaian Tepat Waktu	%	100,00	537.052.950	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Bogor	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	1	3.750.000	
	Peningkatan Status dan Praktek Disiplin Pegawai	Kabupaten Bogor	Jumlah Unit Peningkatan Status dan Praktek Disiplin Pegawai	unit	450,00	123.750.000	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemertiksaan	Kabupaten Bogor	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemertiksaan dan Tindak Lanjut Pemertiksaan	dokumen	1	2.750.000	
	Pengadaan Paket Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kabupaten Bogor	Jumlah Paket Paket Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	paket	300,00	238.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trivulanan/Semesteran SKPD	Kabupaten Bogor	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Trivulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trivulanan/Semesteran SKPD	laporan	12	95.000.000	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kabupaten Bogor	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	dokumen	2,00	32.400.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisa Prognosa Realisasi Anggaran	Kabupaten Bogor	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisa Prognosa Realisasi Anggaran	dokumen	1	3.150.000	
	Monitoring, Evaluasi, dan Pemilaian Kinerja Pegawai	Kabupaten Bogor	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Pemilaian Kinerja Pegawai	dokumen	3,00	8.710.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kabupaten Bogor	Persentase Ases yang Terseksi sesuai dengan Ketentuan Pengelolaan Barang Milik Daerah	%	-	3.800.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kabupaten Bogor	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	350,00	14.300.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten Bogor	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	2	3.800.000	

NO	REKAP						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Bogor	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	130,00	95.192.950	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kabupaten Bogor	Persentase ASB yang Tertinggal Layanan Kepegawaian Tepat Waktu	%	-	539.850.000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Bogor	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	3,00	37.609.000	Peningkatan Sarana dan Prasarana Organisasi Pegawai	Kabupaten Bogor	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	unit	400	123.750.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Bogor	Persentase Terealisasi Jasa Pelayanan Administrasi Umum	%	100,00	1.722.463.270	Perbaikan Pakelan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kabupaten Bogor	Jumlah Paket Pakelan Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	paket	300	225.000.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Bogor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	1,00	100.919.025	Pendataan dan Pengalihan Administrasi Kepegawaian	Kabupaten Bogor	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengalihan Administrasi Kepegawaian	dokumen	2	32.400.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Bogor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	3,00	259.957.874	Mentoring, Evaluasi, dan Pendataan Kinerja Pegawai	Kabupaten Bogor	Jumlah Dokumen Mentoring, Evaluasi, dan Pendataan Kinerja Pegawai	dokumen	2	8.700.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Bogor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	2,00	18.962.925	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Bantawarkan Tugas dan Fungsi	Kabupaten Bogor	Jumlah Pegawai Bantawarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	350	14.500.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Bogor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	2,00	120.246.600	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Bogor	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	150	98.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Bogor	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	2,00	56.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Bogor	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	5	37.500.000	
	Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Bogor	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	1,00	27.120.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Bogor	Persentase Terealisasi Jasa Pelayanan Administrasi Umum	%	-	1.722.712.300	
	Facilitasi Kunjungan Tamu	Kabupaten Bogor	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	laporan	12,00	228.690.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Bogor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	1	101.030.000	
	Pengelolaan Baper Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Bogor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Baper Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	2,00	853.970.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Bogor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	3	260.000.000	

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	REJKA				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
			INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Penyusunan Arsip Dinamis pada SKPD	Kabupaten Bogor	Jumlah Dokumen Penyusunan Arsip Dinamis pada SKPD	dokumen	1,00	31.500.000	Penyediaan Perencanaan Rumah Tangga	Kabupaten Bogor	Jumlah Paket Perencanaan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	2	19.000.000	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kabupaten Bogor	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	dokumen	1,00	25.096.846	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Bogor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	3	120.580.300	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Bogor	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana yang sesuai dengan ketentuan	%	100,00	1.082.874.000	Pengadaan Barang Cetak dan Penggantian	Kabupaten Bogor	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggantian yang Disediakan	paket	2	56.000.000	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Bogor	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	unit	4,00	371.504.000	Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Bogor	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	dokumen	1	26.712.000	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Bogor	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	5,00	197.500.000	fasilitas Kunjungan Tawar	Kabupaten Bogor	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Tawar	laporan	12	228.000.000	
	Pengadaan Mebel	Kabupaten Bogor	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	43,00	136.500.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Bogor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	2	894.000.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Kabupaten Bogor	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang Disediakan	unit	30,00	377.170.096	Penyusunan Arsip Dinamis pada SKPD	Kabupaten Bogor	Jumlah Dokumen Penyusunan Arsip Dinamis pada SKPD	dokumen	1	31.500.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Bogor	Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100,00	2.207.369.487	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kabupaten Bogor	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	dokumen	1	25.200.000	
	Pengadaan Jasa Konstruksi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Bogor	Jumlah Laporan Pengadaan Jasa Konstruksi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12,00	746.443.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Bogor	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana yang sesuai dengan ketentuan	%	-	1.082.874.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Urusan Kantor	Kabupaten Bogor	Jumlah Laporan Pengadaan Jasa Pelayanan Urusan Kantor yang Disediakan	laporan	12,00	1.530.926.487	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Bogor	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	unit	4	371.520.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Bogor	Persentase Barang Milik Daerah Yang Penuhilah Dengan Baik	%	100,00	1.061.800.107	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Bogor	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	5	197.500.000	

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	REKAP				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
			INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perlakuan Kerusakan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Bogor	Jumlah Kerusakan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Peak dan Perlebarnya	unit	181,00	637.300.000	Pengadaan Mebel	Kabupaten Bogor	Jumlah Peke Mebel yang Disediakan	unit	43	136.500.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Bogor	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	20,00	2.139.994.107	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Kabupaten Bogor	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	30	377.170.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Bogor	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ direhabilitasi	unit	296,50	284.606.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Bogor	Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	-	2.547.762.730	
							Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Bogor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	747.762.730	
							Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Bogor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	1.800.000.000	
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Bogor	Persentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara Dengan Baik	%	-	3.142.000.000	
							Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perawatan, Kerdaman Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Bogor	Jumlah Kerdaman Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perlebarnya	unit	181	692.000.000	
							Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Bogor	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	20	2.140.000.000	

NO	RENJA						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM (KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Perencanaan/Revisi/Obat Sarana dan Peralatan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Bogor	Jumlah Sarana dan Peralatan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diperlukan/ Dikebutuhkan	unit	296	310.000.000	
	TOTAL (Rp)					90.001.000.010	TOTAL (Rp)					100.735.818.049	

Tabel 2.4
Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Kabupaten Bogor

Nama Perangkat Daerah : DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME (5)			SATUAN	CATATAN
				TEKNOKRATIK (A)	POKIR DPRD (B)	PRIORITAS BUPATI (MANDIRI BENIH) (C)		
1	2	3	4				6	7
1	PROGRAM PENTEDIAAN DAN PEREMBANGAN SARANA PERTANIAN	Kab. Bogor	Persentase sarana pertanian yang dapat dipenuhi	16,93			%	
1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Kab. Bogor	Jumlah luas area tanam	85.471,27			ha	
1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Kab. Bogor	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas	1			laporan	A
			Jumlah pestisida yang difasilitasi	3			jenis	A
			Jumlah pupuk non subsidi yang diserahkan kepada kelompok tani	5,34			ha	A
			Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Verpal Pupuk Subsidik	120			orang	A
			Jumlah pupuk organik non subsidi yang diserahkan kepada kelompok tani	5,34	56		ha	A+B
			Jumlah kapur pertanian non subsidi yang diserahkan kepada kelompok tani upaya perbaikan lahan pertanian	5,34			ha	A
			Jumlah asosiasi pertanian organik	100			orang	A
			Jumlah luas lahan pertanian organik	10			ha	A
			Jumlah Fasilitas Kelembahan Pupuk dan Pestisida Penangkar Benih Padi Unggul Bersertifikat			200	ha	C
2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kab. Bogor	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1			laporan	A
			Jumlah bantuan alat dan mesin pertanian	14			jenis	A
				134	3		unit	A+B
			Jumlah Fasilitas Kelembahan Alat dan Mesin Pertanian Penangkar Benih Padi Unggul Bersertifikat			200	ha	C
3	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bogor	Jumlah komoditas benih/bibit tanaman pertanian yang bersertifikat	3			cluster komoditas	
3	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih (UPT WJ II) (UPT Perbenihan Palasija Tenjo)	Kab. Bogor	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	1			ton	A
			Jumlah Perbenihan Tanaman 0,5 Ha untuk Produksi Benih Masa Tanam Feb-April (MT I)	0,5			tan	A
			Jumlah Perbenihan Tanaman 0,5 Ha untuk Produksi Benih Masa Tanam Juli-September (MT II)	0,5			tan	A
			Jumlah benih pada MT I yang diproses sertifikasi (Mei-Juni)	0,5			tan	A
			Jumlah benih pada MT II yang diproses sertifikasi (Ok-Nov)	0,5			tan	A
			Jumlah traktor roda 2	1			unit	A
4	Perjwalan Kelestarian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman (UPT Pertanian WJ V) (UPT Cawangulang Perbenihan sayur dan tanaman obat)	Kab. Bogor	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	2			VUB	A
			Jumlah produksi bibit tanaman obat dalam polybag	1,5			polybag	A
			Jumlah produksi bibit tanaman sayur dalam polybag	25			polybag	A
			Jumlah produksi bibit tanaman cabai (pengadaan asprod pada APNAP 2025)	10			polybag	A
			Jumlah penangkaran benih tanaman obat (usia 5 bulan)	3			jenis	A
			Jumlah Pembangunan Green House	1			Unit	A
			Jumlah Penangkaran Tanaman Obat Umur 5 Bulan	3			Jenis	A

NO	PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME (SI)			SATUAN	CATATAN
				DEKONSTRUKSI (A)	POKIR OPD (B)	PRIORITAS BUPATI (MANDIRI BENIH) (C)		
1	2	3	4				6	7
	Penyediaan Kebutuhan dari Ketersediaan SDO Hewan/Tanaman (UPT Perikanan WU VII) (UPT Perikanan Perikanan (Pemerintah))	Kab Bogor	Jumlah SDO Hewan/Tanaman yang Dibutuhkan Pelestarian dan Pemukiman	0			VUB	A
			Jumlah bibit tanaman perkebunan yang dipelihara sesuai tiap etas	28			pohon	A
			Jumlah bibit tanaman perkebunan yang dipelihara setiap 4 bulan	38			pohon	A
			Jumlah kultivator	1			orang	A
	Penyediaan Kebutuhan dan Ketersediaan SDO Hewan/Tanaman (UPT Perikanan WU IX) (Perikanan Buih dan Padi Cibinong)	Kab. Bogor	Jumlah SDO Hewan/Tanaman yang Dibutuhkan Pelestarian dan Pemukiman	2			VUB	A
			Jumlah bibit tanaman buah yang dikembangbiakan (Alpukat)	3			pohon	A
			Jumlah bibit tanaman buah yang dikembangbiakan	27			pot/polybag	A
			Jumlah bibit tanaman buah yang dikembangbiakan (Durian)	2			pohon	A
	Penyediaan Benih Bersertifikasi Tanaman Pangan Persemaian Raji/Berah (UPT WU XI) (UPT Perikanan Padi Tanjungtjaja)	Kab Bogor	Jumlah benih tanaman pangan berbentuk biji/beras yang diperbanyak	60			ton	A
			Jumlah produksi benih seluas 12 Ha dengan masa pemeliharaan dan panen periode Jan-Mar	30			ton	A
			Jumlah produksi benih seluas 12 Ha untuk masa tanam, pemeliharaan, dan panen periode April-September	25			ton	A
			Jumlah luas lahan pemeliharaan dengan masa panen dan pemeliharaan periode Okt-Des	12			Ha	A
			Jumlah produksi benih padi			60	Ton	C
5	Peningkatan Kualitas SDO Hewan/Tanaman (UPT Perikanan Wiyah III) (UPT Melaka Cigugur)	KAB Bogor	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDO Hewan/Tanaman	1			laporan	A
			Jumlah UPJA yang dibina	18			UPJA	A
			Jumlah tanaman yang dipelihara/diperbaiki	65			unit	A
			Jumlah buku cadang yang disediakan	13			jenis	A
			Jumlah alat untuk brigade	10			unit	A
			Jumlah bibit untuk alih daya	5			kg	A
	Peningkatan Kualitas SDO Hewan/Tanaman (UPT WU IV) (UPT Melaka Dramaga)	Kab Bogor	Jumlah Pelaksanaan peningkatan Kualitas SDO Hewan/Tanaman	1			dokumen	A
			Jumlah UPJA yang dibina	14			UPJA	A
			Jumlah tanaman yang dipelihara/diperbaiki	50			unit	A
			Jumlah buku cadang yang disediakan	7			jenis	A
			Jumlah alat untuk brigade	2			unit	A
			Jumlah bibit untuk alih daya	3			kg	A
			Jumlah bibit benih untuk alih daya	1			unit	A
			Jumlah alat percontohan	14			jenis	A
	Peningkatan Kualitas SDO Hewan/Tanaman (UPT WU X)	KAB. Bogor	Jumlah Pelaksanaan peningkatan Kualitas SDO Hewan/Tanaman	1			dokumen	A
			Jumlah UPJA yang dibina	18			UPJA	A
			Jumlah tanaman yang dipelihara/diperbaiki	60			unit	A
			Jumlah buku cadang dan alat percontohan	9			jenis	A
			Jumlah alat untuk brigade	3			unit	A
			Jumlah bibit untuk alih daya	3			kg	A
			Jumlah bibit benih untuk alih daya	1			unit	A
6	Pemeliharaan SDO Hewan/Tanaman	Kab Bogor	Jumlah Pemeliharaan SDO Hewan/Tanaman	2			dokumen	A
			Jumlah benih padi yang disediakan	200		200	ha	A+C
			Jumlah benih cabai yang disediakan	100			ha	A
			Jumlah mata yang disediakan	100			ha	A
			Jumlah bibit alpaka yang disediakan	20			ton	A
			Jumlah bibit durian yang disediakan	15			ton	A
			Jumlah bibit pala yang disediakan	20			ton	A
			Jumlah bibit kopi yang disediakan	20			ton	A
			Jumlah bibit mangga yang disediakan	140			ha	A

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME (5)			SATUAN	CATATAN
				TEKNOKRATIK (A)	POKIR DPRD (B)	PRIORITAS BUPATI (MANDIRI BENIH) (C)		
1	2	3	4				6	7
			Jumlah bibit renggeng yang difasilitasi	10			ha	A
			Jumlah bibit jagung hibrida yang difasilitasi	100.0			ha	A
			Jumlah bibit pisang yang difasilitasi	20			ha	A
			Jumlah bibit cabai yang difasilitasi	20			ha	A
			Jumlah bibit luyang yang difasilitasi	20			ha	A
			Jumlah bibit kangkung yang difasilitasi	20			ha	A
			Jumlah bibit Kriman yang difasilitasi	10000			batang	A
			Jumlah bibit aglonema yang difasilitasi	500			batang	A
			Jumlah bibit anggrek yang difasilitasi	15000			batang	A
			Jumlah Fasilitas Kebutuhan Benih, pendampingan dan sertifikasi Penangkar Benih Padi Unggul Bersertifikat			200	ha	C
2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Kab. Bogor	Persentase prasarana pertanian yang dapat dipenuhi	17,53			%	
3	Pengembangan Prasarana Pertanian	Kab. Bogor	Jumlah informasi pengembangan prasarana pertanian	3			dokumen	
7	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B	Kab. Bogor	Jumlah Dokumen Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola	1			dokumen	A
8	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Kab. Bogor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1			laporan	A
9	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Kab. Bogor	Jumlah Dokumen Actionplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan, dan Komoditas Pertanian	1			dokumen	A
10	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Kab. Bogor	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	1			dokumen	A
4	Pembangunan Prasarana Pertanian	Kab. Bogor	Jumlah prasarana pertanian yang terbangun	35			unit	
11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Kab. Bogor	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	16	8		unit	A+B
			Jumlah Fasilitas bangunan Gudang dan Pengering Benih untuk Penangkar Benih Padi Unggul Bersertifikat			20	Kelompok Tani	C
12	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Kab. Bogor	Jumlah Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	6	12		unit	A+B
13	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Kab. Bogor	Jumlah Dam Parit yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	3			unit	A
14	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Kab. Bogor	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1			unit	A
15	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Salat Periyuh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Kab. Bogor	Jumlah Salat Periyuh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1			unit	A
16	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Kab. Bogor	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	5	1	20	unit	A+B+C
			Jumlah Fasilitas Gudang dan Bangunan Pengering untuk Penangkar Benih Padi Unggul Bersertifikat			20	Kelompok Tani	C
3	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Kab. Bogor	Persentase penanganan Dampak Perubahan Iklim terhadap pertanian	27,93			%	
1	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Kab. Bogor	Jumlah cakupan luas lahan pengendalian dan penanganan bencana pertanian	10			ha	
17	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (UPT WI 1) (UPT Proteksi Parang Panjang)	Kab. Bogor	Jumlah luas serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang dikendalikan	450			Ha	A
			Jumlah gerakan pengendalian OPT dan sarana pendukungnya	7			Gerakan	A
			Jumlah lokasi diseminasi teknologi pengendalian OPT	7			Kelompok Tani	A

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME (5)			SATUAN	CATATAN
				TEKNOKRATIK (A)	POKIR DPRD (B)	PRIORITAS BUPATI (MANDIRI BENIH) (C)		
1	2	3	4				6	7
			Jumlah pesemapan pengendalian OPT dan sarana pendukungnya	7			Kelompok Tani	A
			Jumlah jaring burung yang difasilitasi	240			unit	A
	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (UPT WU XII) (UPT Proteksi Ciri)	Kab. Bogor	Jumlah jaring burung yang difasilitasi	500			ha	A
			Jumlah gerakan pengendalian OPT dan sarana pendukungnya	15			Gerakan	A
			Jumlah lokasi diseminasi teknologi pengendalian OPT	15			Kelompok Tani	A
			Jumlah pesemapan pengendalian OPT dan sarana pendukungnya	10			Kelompok Tani	A
			Jumlah jaring burung yang difasilitasi	300			unit	A
18	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Kab. Bogor	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	10			ha	A
			Jumlah kajian mitigasi DPI	1			dokumen	A
19	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Kab. Bogor	Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan hortikultura dan perkebunan	1			laporan	A
			Jumlah peserta rakor dan sosialisasi penanggulangan pasca bencana pertanian	300	300		orang	A+B
4	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Kab. Bogor	Persentase pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan pelayanan pertambangan teknis lain usaha pertanian	28,49			%	
6	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bogor	Jumlah fasilitasi pendampingan pelaku usaha dalam pengajuan izin usaha pertanian	249			pelaku usaha	
20	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Kab. Bogor	Jumlah Dok Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian (dok sasaran pertanian, dok monografi, buku saku, dan statistik perkebunan)	4			dokumen	A
21	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Kab. Bogor	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	1			dokumen	A
			Jumlah kelompok tani yang mengajukan registrasi kebun komoditas hortikultura	16			poktan/pelaku usaha	A
			Jumlah pelaku usaha perkebunan	10			perusahaan	A
			Jumlah pelaku usaha tanaman pangan (beras ASN)	13			poktan	A
			Jumlah pameran	2			kali	A
			Jumlah pembinaan poktan kopi	10			poktan	A
			Jumlah sertifikasi komoditas organik	3			poktan	A
			Jumlah Fasilitasi kestranan Penangkar benih Padi Unggul Bersertifikat			20	Kelompok Tani	C
22	Binaan dan Pengawasan Penerapan Standar dan Izin Usaha Pertanian (UPT WU IV)	Kab. Bogor	Jumlah izin Usaha Pertanian yang Ditina dan Diawasi	1			laporan	A
			Jumlah pelaku usaha yang ditina dan diawasi penerapan izin usahanya	120			pelaku usaha	A
			Jumlah Penyelenggaraan Promosi/Pameran Komoditas Pertanian	8			kali	A
			Jumlah pemberdayaan keluarga miskin	20			KK	A
	Binaan dan Pengawasan Penerapan Standar dan Izin Usaha Pertanian (UPT WU VII)	Kab. Bogor	Jumlah izin Usaha Pertanian yang Ditina dan Diawasi	1			laporan	A
			Jumlah Pelaku usaha yang ditina dan diawasi penerapan izin usahanya	80			pelaku usaha	A
			Jumlah Penyelenggaraan Promosi/Pameran Komoditas Pertanian	8			kali	A
5	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Kab. Bogor	Persentase peningkatan kompetensi SDM pertanian	1,98			%	
7	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Kab. Bogor	Persentase peningkatan kemampuan kelas kelompok tani berdasarkan skor penilaian	53,00			%	
23	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Kab. Bogor	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya	13			unit	A
			Jumlah Penyuluh Pertanian Swadaya yang terakreditasi dalam pelaksanaan tugas	190			orang	A
			Jumlah Fasilitasi rapat pertemuan 2 minggu BPP	286			kali	A

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME (5)			SATUAN	CATATAN
				TEKNOKRATIK (A)	POKIR DPRD (B)	PRIORITAS BUPATI (MANDIRI BENIH) (C)		
1	2	3	4				6	7
			Jumlah penyuluh pertanian yang terukur kinerjanya dalam melaksanakan tugas	190			orang	A
			Jumlah penyuluh pertanian dan kelembagaan penyuluhan tingkat desa yang dinilai	3			paket	A
			Jumlah penyuluh pertanian swadaya yang disertifikasi	25			orang	A
			Jumlah peserta sosialisasi perbup penyelesaian penyuluhan tingkat desa/kecamatan	100			orang	A
			Jumlah peserta binstek penyuluh pertanian	30			orang	A
24	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Kab. Bogor	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100			kelompok tani	A
			Jumlah pelatihan petani milenial, gepokan, poduhdes, dan petani berprestasi	7	2		paket	A+B
			Jumlah bibit yang difasilitasi untuk lomba lomba tingkat provinsi	1,05			pohon/benih	A
			Jumlah tersumahnya dokumentasi RDKK yang difasilitasi	2.225			dokumen	A
			Jumlah pendampingan lomba tingkat provinsi yang difasilitasi	7			Kategori	A
			Jumlah pembinaan lomba tingkat kabupaten yang difasilitasi	21			Kegiatan	A
			Jumlah terselenggaranya pelatihan bagi petani	10			angkatan	A
			Jumlah terselenggaranya HKP Tingkat Provinsi	1			Kali	A
			Jumlah fasilitasi identifikasi kelompok serta peningkatan kompetensi Penangkar Benih Padi Bersertifikat			20	Kelompok Tani	C
25	Penyediaan dan Prasarana Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Kab. Bogor	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	13			unit	A
			Jumlah lahan percontohan BPP (Green House) yang terbangun dan terpelihara	2			unit	A
			Jumlah Demplot BPP yang terfasilitasi	8			unit	A
			Jumlah Pemaksimalan dan Pemeliharaan Lahan Percontohan Dinas	1			paket	A
			Jumlah bangunan pada lahan APS yang terpelihara	1			unit	A
			Jumlah Perjudinan Dinas Penyuluh/Kearifan yang terfasilitasi	1,04			HOK	A
26	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Bogor	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	15			unit	A
			Jumlah Sekolah Lapang Penangkar Benih Padi Unggul Bersertifikat			4	Unit	C
27	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Kab. Bogor	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	190			orang	A
			Jumlah peserta pelatihan spesifik lokalita	307			orang	A
			Jumlah peserta binstek kepemimpinan kelembagaan petani	30			orang	A
28	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Bogor	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya	13			unit	A
29	Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani	Kab. Bogor	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk	5			unit	A
			Jumlah pelatihan pertumbuhan dan pengembangan KEP	5			kegiatan	A
			Jumlah pelaksanaan pembinaan KEP	5			kegiatan	A
30	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Kab. Bogor	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian	1			dukumen	A
			Jumlah peningkatan kapasitas petani milenial	6	13		kegiatan	A
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Bogor	Nilai AKIP Perangkat Daerah	74,35			Poin	
8	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bogor	Persentase Dokumen Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja PD yang Berkualitas	100			%	
31	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bogor	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12			dukumen	A

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME (5)			SATUAN	CATATAN
				TEKNOKRATIK (A)	POKR DPRD (B)	PRIORITAS BUPATI (MANDIRI BENIH) (C)		
1	2	3	4				6	7
32	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Bogor	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1			dokumen	A
33	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Bogor	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2			dokumen	A
34	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Bogor	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1			dokumen	A
35	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Bogor	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2			dokumen	A
36	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bogor	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	14			laporan	A
37	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bogor	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17			laporan	A
9	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bogor	Persentase realisasi anggaran perangkat daerah	98,21	98,21	98,21	%	
38	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bogor	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	291			orang/bulan	A
39	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Bogor	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12			dokumen atau bulanan	A
40	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Bogor	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2			dokumen	A
41	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Bogor	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1			laporan	A
42	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Bogor	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1			dokumen	A
43	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Bogor	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12			laporan	A
44	Penyusunan Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Bogor	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran	1			dokumen	A
10	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Bogor	Persentase Aset yang Tertatat sesuai dengan Ketentuan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100			%	
45	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Bogor	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2			laporan	A
11	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Bogor	Persentase ASN yang Tertangani Layanan Kepegawaian Tepat Waktu				%	
46	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab. Bogor	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	450			unit	A
47	Pengadaan Pakem Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Bogor	Jumlah Paket Pakem Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	300			paket	A
48	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Bogor	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2			dokumen	A
49	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Bogor	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2			dokumen	A
50	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Bogor	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	350			orang	A
51	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Bogor	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	150			orang	A
52	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Bogor	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5			orang	A
12	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bogor	Persentase Terpenuhinya Jasa Pelayanan Administrasi Umum				%	
53	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bogor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1			paket	A

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME (5)			SATUAN	CATATAN
				TEKNOKRATIK (A)	POKIR DPRD (B)	PRIORITAS BUPATI (MANDIRI BENIH) (C)		
54	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab Bogor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3			paket	A
55	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab Bogor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3			paket	A
56	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab Bogor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2			paket	A
57	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab Bogor	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2			paket	A
58	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab Bogor	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1			dokumen	A
59	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab Bogor	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12			laporan	A
60	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab Bogor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2			laporan	A
61	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab Bogor	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1			dokumen	A
62	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab Bogor	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1			dokumen	A
13	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab Bogor	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana yang sesuai dengan Ketentuan				%	
63	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab Bogor	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4			unit	A
64	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab Bogor	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5			unit	A
65	Pengadaan Mebel	Kab Bogor	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	43			jenis	A
66	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Kab Bogor	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang Disediakan	32			unit	A
14	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab Bogor	Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				%	
67	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab Bogor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12			laporan	A
68	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab Bogor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12			laporan	A
15	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab Bogor	Persentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara Dengan Baik				%	
69	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab Bogor	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinasnya	181			unit	A
70	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Kab Bogor	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	20			unit	A
71	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Kab Bogor	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	296			unit	A

Petunjuk pengisian :

Kolom (1) : Diisi dengan nomor urut

Kolom (2) : Diisi dengan nama program, kegiatan dan sub kegiatan yang diusulkan oleh pemangku kepentingan

Kolom (3) : Diisi dengan lokasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang diusulkan oleh pemangku kepentingan

Kolom (4) : Diisi dengan indikator kinerja yang merepresentasikan program, kegiatan dan sub kegiatan yang diusulkan oleh pemangku kepentingan

Kolom (5) : Diisi dengan volume indikator kinerja yang merepresentasikan program, kegiatan dan sub kegiatan yang diusulkan oleh pemangku kepentingan

Kolom (6) : Diisi dengan satuan volume dan indikator kinerja yang merepresentasikan program, kegiatan dan sub kegiatan yang diusulkan oleh pemangku kepentingan

Kolom (7) : Diisi dengan sumber usulan dari pemangku kepentingan.

Tabel 3.1
Keterkaitan Program dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2026

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN JAWA BARAT	PROGRAM	OUTCOME		TARGET		
			TOLOK UKUR KINERJA	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	
1	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Terpenuhinya kebutuhan sarana pertanian	Persentase sarana pertanian yang dapat dipenuhi	16,93	%	23.215.465.673
		Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Terpenuhinya kebutuhan prasarana pertanian	Persentase prasarana pertanian yang dapat dipenuhi	17,55	%	15.711.177.287
		Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase penanganan Dampak Perubahan Iklim terhadap pertanian	27,95	%	2.233.740.452
		Perizinan Usaha Pertanian	Meningkatnya pelayanan ijin usaha pertanian	Persentase pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan pelayanan pertimbangan teknis izin usaha pertanian	66,71	%	2.829.999.854
		Program Penyuluhan Pertanian	Meningkatnya kualitas SDM pertanian	Persentase peningkatan kompetensi SDM pertanian	1,98	%	8.073.340.492

Petunjuk pengisian :

Kolom (1) : Diisi dengan no urut

Kolom (2) : Diisi dengan program prioritas Nasional yang didukung oleh program perangkat daerah

Kolom (3) : Diisi dengan nama program PD yang akan dilaksanakan tahun 2026, mendukung prioritas Nasional

Kolom (4) : Diisi dengan hasil yang ingin dicapai oleh program dimaksud

Kolom (5) : Diisi dengan indikator kinerja yang merepresentasikan capaian program dimaksud

Kolom (6) : Diisi dengan target program berdasarkan indikator (volume dan satuan)

Kolom (7) : Diisi dengan rencana anggaran yang mendukung program dan prioritas pembangunan Nasional

Tabel 3.2
Keterkaitan Program dengan Prioritas Pembangunan Jawa Barat Tahun 2026

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN JAWA BARAT	PROGRAM	OUTCOME		TARGET		
			TOLOK UKUR KINERJA	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	
1	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif (Stabilitas Ekonomi Daerah)	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Terpenuhinya kebutuhan sarana pertanian	Persentase sarana pertanian yang dapat dipenuhi	16,93	%	23.215.465.673
		Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Terpenuhinya kebutuhan prasarana pertanian	Persentase prasarana pertanian yang dapat dipenuhi	17,55	%	15.711.177.287
		Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase penanganan Dampak Perubahan Iklim terhadap pertanian	27,95	%	2.233.740.452
		Perizinan Usaha Pertanian	Meningkatnya pelayanan ijin usaha pertanian	Persentase pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan pelayanan pertimbangan teknis izin usaha pertanian	66,71	%	2.829.999.854
		Program Penyuluhan Pertanian	Meningkatnya kualitas SDM pertanian	Persentase peningkatan kompetensi SDM pertanian	1,98	%	8.073.340.492

Pelunjuk pengisian :

- Kolom (1) : Diisi dengan no urut
- Kolom (2) : Diisi dengan program prioritas Jawa Barat yang didukung oleh program perangkat daerah
- Kolom (3) : Diisi dengan nama program PD yang akan dilaksanakan tahun 2026, mendukung prioritas Jawa Barat
- Kolom (4) : Diisi dengan hasil yang ingin dicapai oleh program dimaksud
- Kolom (5) : Diisi dengan indikator kinerja yang merepresentasikan capaian program dimaksud
- Kolom (6) : Diisi dengan target program berdasarkan indikator (volume dan satuan)
- Kolom (7) : Diisi dengan rencana anggaran yang mendukung program dan prioritas pembangunan Jawa Barat

Tabel 3.3
Dukungan Terhadap Arak Kebijakan Nasional

KEBIJAKAN NASIONAL 1	TUGAS DAN FUNGSI YANG Mendukung 2	PENGAMPU 3
Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.	Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan tugas pembantuan.	A. Sekretariat, membawahkan : 1. Ketua Tim Program dan Pelaporan; 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan 3. Sub Bagian Keuangan.
	Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :	B. Bidang Sarana Pertanian, membawahkan : 1. Ketua Tim Pupuk dan Pestisida; 2. Ketua Tim Alat dan Mesin; dan 3. Ketua Tim Pengelola Sumber Day Genetik Tanaman.
	1. Perumusan kebijakan bidang sarana, prasarana, perlindungan dan pelayanan, serta penyuluhan pertanian.	C. Bidang Prasarana Pertanian, membawahkan : 1. Ketua Tim Pengelola Lahan; 2. Ketua Tim Pengelola Air; dan 3. Ketua Tim Infrastruktur.
	2. Perumusan kebijakan bidang sarana, prasarana, perlindungan dan pelayanan, serta penyuluhan pertanian.	D. Bidang Perlindungan dan Pelayanan Pertanian, membawahkan : 1. Ketua Tim Perlindungan Pertanian; 2. Ketua Tim Pelayanan Usaha; dan 3. Ketua Tim Data dan Informasi.
	3. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang sarana, prasarana, perlindungan dan pelayanan, serta penyuluhan pertanian.	E. Bidang Penyuluhan Pertanian, membawahkan : 1. Ketua Tim Kelembagaan; 2. Ketua Tim Ketenagaan; dan 3. Ketua Tim Sarana dan Prasarana Penyuluhan.
	4. Pelaksanaan administrasi dinas.	F. UPT : 1. UPT Mekanisasi Pertanian; 2. UPT Perbenihan; 3. UPT Proteksi Tanaman; dan 4. UPT Agribisnis.
	5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.	G. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tabel 3.4
Tujuan dan Sasaran DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN Tahun 2026

URAIAN	TOLOK UKUR	INDIKATOR	RUMUS	TARGET	
				VOLUME	SATUAN
1	2	3	4	5	
TUJUAN					
Meningkatnya produksi pertanian	Meningkatnya produk pertanian yang berdaya saing	Jumlah produk tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	Total produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	Ton	713.490
SASARAN					
Meningkatnya produktivitas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	Meningkatnya produktivitas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	Produktivitas pertanian per hektar	Produksi Komoditas Yang Diintervensi / Luas Panen Komoditas Yang Diintervensi (Padi, Jagung, Ubi Jalar, Ubi Kayu, Talas, Kacang Tanah, Cabai, Tomat, Pisang, Manggis, Alpukat, Durian, Nanas, Jahe, Lengkoas, Kencur, Kopi, Pala, Cengkeh, Krisan, Anggrek, Aglonema, dan Pilodendron)	Ton/Ha	7,16

Tabel 3.6
Rekapitulasi Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025

BIDANG / BAGIAN	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5
Bidang Sarana Pertanian	1	2	6	23.215.465.673
Bidang Prasarana Pertanian	1	2	10	15.711.177.287
Bidang Perlindungan dan Pelayanan Usaha Pertanian	2	2	6	5.063.740.452
Bidang Penyuluhan	1	1	8	8.073.340.492
Sekretariat	1	8	41	47.019.281.258
Total	6	15	71	99.083.005.016

TABEL 4.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2026

URUSAN / UNSUR : PILIHAN
 BIDANG URUSAN : PERTANIAN
 PERANGKAT DAERAH : DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	
				VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase sarana pertanian yang dapat dipenuhi	%	16,93	23.215.465.673	Kabupaten Bogor	PAD	17,21	47.757.501.587
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah luas areal tanam	ha	85.471,27	12.257.333.196	Kabupaten Bogor	PAD	85,576	31.697.608.558
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas	laporan	1,00	6.064.799.418	Kabupaten Bogor	PAD	1	14.231.949.813
		Jumlah pestisida yang difasilitasi	jenis	3,00		Kabupaten Bogor	PAD	3	-
		Jumlah pupuk non subsidi yang disalurkan kepada kelompok tani	ha	5.340,00		Kabupaten Bogor	PAD	5,5	-
		Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Verpal Pupuk Subsidi	orang	120,00		Kabupaten Bogor	PAD	120	-
		Jumlah pupuk organik non subsidi yang disalurkan kepada kelompok tani	ha	5.340,00		Kabupaten Bogor	PAD	5,5	-
		Jumlah kapur pertanian non subsidi yang disalurkan kepada kelompok tani upaya perbaikan lahan pertanian	ha	5.340,00		Kabupaten Bogor	PAD	5,5	-
		Jumlah sosialisasi pertanian organik	orang	100,00		Kabupaten Bogor	PAD	100	-
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	laporan	1,00	6.192.533.778	Kabupaten Bogor	PAD	1	17.465.658.745
		Jumlah bantuan alat dan mesin pertanian	jenis	14,00		Kabupaten Bogor	PAD	14	-

NO	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	
				VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			unit	134,00		Kabupaten Bogor	PAD	139	-
	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih (UPT Wil II)	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	ton	1,00	508.258.000	Kabupaten Bogor	PAD	1	475.921.000
		Jumlah Perbenihan Tanaman 0,5 Ha untuk Produksi Benih Masa Tanam Feb-April (MT I)	ton	0,50		Kabupaten Bogor	PAD	1	-
		Jumlah Perbenihan Tanaman 0,5 Ha untuk Produksi Benih Masa Tanam Juli-September (MT II)	ton	0,50		Kabupaten Bogor	PAD	1	-
		Jumlah benih pada MT I yang diproses sertifikasi (Mei-Juni)	ton	0,50		Kabupaten Bogor	PAD	1	-
		Jumlah benih pada MT II yang diproses sertifikasi (Okt-Nov)	ton	0,50		Kabupaten Bogor	PAD	1	-
		Jumlah traktor roda 2	unit	1,00		Kabupaten Bogor	PAD	-	-
	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih (UPT Wil XI)	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	ton	60,00	1.199.998.180	Kabupaten Bogor	PAD	61	3.800.000.000
		Produksi benih seluas 12 Ha dengan masa pemeliharaan dan panen periode Jan-Mar	ton	35,00		Kabupaten Bogor	PAD	35	-
		Produksi benih seluas 12 Ha untuk masa tanam, pemeliharaan, dan panen periode April-September	ton	25,00		Kabupaten Bogor	PAD	26	-
		Luas lahan pembenihan dengan masa tanam dan pemeliharaan periode Okt-Des	Ha	12,00		Kabupaten Bogor	PAD	12	-
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (UPT Pertanian Wilayah III)	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	laporan	1,00	780.953.650	Kabupaten Bogor	PAD	1	800.000.000
		Jumlah UPJA yang dibina	UPJA	15,00		Kabupaten Bogor	PAD	16	-
		Jumlah alsintan yang dipelihara/diperbaiki	unit	65,00		Kabupaten Bogor	PAD	75	-
		Jumlah mobil bengkel keliling	unit	-		Kabupaten Bogor	PAD	-	-
		Jumlah suku cadang yang difasilitasi	jenis	13,00		Kabupaten Bogor	PAD	13	-

NO	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	
				VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah alsintan untuk brigade	unit	10,00		Kabupaten Bogor	PAD	10	-
		Jumlah bimtek teknisi alsintan	kali	5,00		Kabupaten Bogor	PAD	5	-
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (UPT Wil VI)	Jumlah pelaksanaan peningkatan kualitas SDG Hewan/Tanaman	dokumen	1,00	857.715.090	Kabupaten Bogor	PAD	1	565.779.067
		Jumlah UPJA yang dibina	UPJA	14,00		Kabupaten Bogor	PAD	14	-
		Jumlah alsintan yang dipelihara/diperbaiki	unit	50,00		Kabupaten Bogor	PAD	50	-
		Jumlah suku cadang yang difasilitasi	jenis	7,00		Kabupaten Bogor	PAD	7	-
		Jumlah alsintan untuk brigade	unit	2,00		Kabupaten Bogor	PAD	2	-
		Jumlah bimtek teknisi alsintan	kali	3,00		Kabupaten Bogor	PAD	3	-
		Jumlah mobil bengkel keliling	unit	1,00		Kabupaten Bogor	PAD	-	-
		Jumlah alat perbengkelan	jenis	14,00		Kabupaten Bogor	PAD	5	-
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (UPT Wil X)	Jumlah pelaksanaan peningkatan kualitas SDG Hewan/Tanaman	dokumen	1,00	750.000.000	Kabupaten Bogor	PAD	1	457.907.321
		Jumlah UPJA yang dibina	UPJA	18,00		Kabupaten Bogor	PAD	18	-
		Jumlah alsintan yang dipelihara/diperbaiki	unit	60,00		Kabupaten Bogor	PAD	65	-
		Jumlah suku cadang dan alat perbengkelan	jenis	9,00		Kabupaten Bogor	PAD	9	-
		Jumlah alsintan untuk brigade	unit	3,00		Kabupaten Bogor	PAD	3	-
		Jumlah bimtek teknisi alsintan	kali	3,00		Kabupaten Bogor	PAD	3	-
		Jumlah mobil bengkel keliling	unit	1,00		Kabupaten Bogor	PAD	-	-

NO	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	
				VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah komoditas benih/bibit tanaman pertanian yang bersertifikat	cluster komoditas	3,00	10.958.132.477	Kabupaten Bogor	PAD	3	16.059.893.029
						Kabupaten Bogor	PAD	2	932.058.026
	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman (UPT Pertanian Wil V)	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	VUB	2,00	847.325,478	Kabupaten Bogor	PAD	1,5	
		Jumlah produksi bibit tanaman obat dalam polybag	polybag	1.500,00		Kabupaten Bogor	PAD	27	-
		Jumlah produksi bibit tanaman sayur dalam polybag	polybag	25.000,00		Kabupaten Bogor	PAD	-	-
		Jumlah produksi bibit tanaman cabai (pengadaan saprodi pada APBDP 2025)	polybag	10.000,00		Kabupaten Bogor	PAD	10	-
		Jumlah penangkaran benih tanaman obat (usia 5 bulan)	jenis	1,00		Kabupaten Bogor	PAD	-	-
	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman (UPT Pertanian Wil VIII)	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	VUB	3,00	925.000.000	Kabupaten Bogor	PAD	1	-
		Jumlah bibit tanaman perkebunan yang dipelihara sampai siap edar	pohon	28.000,00		Kabupaten Bogor	PAD	-	-
		Jumlah bibit tanaman perkebunan yang dipelihara selama 4 bulan	pohon	38.000,00		Kabupaten Bogor	PAD	-	-
		Jumlah kultivator	unit	1,00		Kabupaten Bogor	PAD	1	-
	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman (UPT Pertanian Wil IX)	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	VUB	2,00	783.605.136	Kabupaten Bogor	PAD	1	-
		Jumlah bibit tanaman buah yang dikembangkan (Alpukat)	pohon	2.500,00		Kabupaten Bogor	PAD	3	-

NO	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	
				VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah bibit tanaman hias yang dikembangkan	pot/polybag	2.500,00					
	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	dokumen	2,00	4.305.276.943	Kabupaten Bogor	PAD	2	7.293.227.615
		Jumlah benih padi yang difasilitasi	ha	5.000,00		Kabupaten Bogor	PAD	5	
		Jumlah benih cabai yang difasilitasi	ha	340,00		Kabupaten Bogor	PAD	100	
		Jumlah mulsa yang difasilitasi	ha	340,00		Kabupaten Bogor	PAD	100	
		Jumlah bibit alpukat yang difasilitasi	ha	450,00		Kabupaten Bogor	PAD	20	
		Jumlah bibit durian yang difasilitasi	ha	505,00		Kabupaten Bogor	PAD	20	
		Jumlah bibit pala yang difasilitasi	ha	10,00		Kabupaten Bogor	PAD	20	
		Jumlah bibit kopi yang difasilitasi	ha	70,00		Kabupaten Bogor	PAD	15	
		Jumlah bibit manggis yang difasilitasi	ha	170,00		Kabupaten Bogor	PAD	20	
		Jumlah bibit jambu kristal yang difasilitasi	ha	12,50		Kabupaten Bogor	PAD	-	
		Jumlah bibit kemang yang difasilitasi	ha	-		Kabupaten Bogor	PAD	-	
		Jumlah bibit mangga yang difasilitasi	ha	140,00		Kabupaten Bogor	PAD	-	
		Jumlah bibit cengeh yang difasilitasi	ha	65,00		Kabupaten Bogor	PAD	50	
		Jumlah benih jagung hibrida yang difasilitasi	ha	306,20		Kabupaten Bogor	PAD	-	
		Jumlah benih jagung manis yang difasilitasi	ha	75,00		Kabupaten Bogor	PAD	10	
		Jumlah bibit pisang yang difasilitasi	ha	110,00		Kabupaten Bogor	PAD	20	
		Jumlah bibit rambutan yang difasilitasi	ha	50,00		Kabupaten Bogor	PAD	-	
		Jumlah bibit lengkeng yang difasilitasi	ha	50,00		Kabupaten Bogor	PAD	20	
		Jumlah bibit caisin yang difasilitasi	ha	40,00		Kabupaten Bogor	PAD	10	
		Jumlah bibit bayam yang difasilitasi	ha	40,00		Kabupaten Bogor	PAD	500	
		Jumlah bibit kangkung yang difasilitasi	ha	40,00		Kabupaten Bogor	PAD	500	
		Jumlah bibit terung yang difasilitasi	ha	40,00		Kabupaten Bogor	PAD	376,8	

NO	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027		
				VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Jumlah bibit tomat yang difasilitasi	ha	40,00		Kabupaten Bogor	PAD	100		
		Jumlah bibit mentimun yang difasilitasi	ha	40,00		Kabupaten Bogor	PAD	5		
		Jumlah bibit Krisan yang difasilitasi	batang	10.000,00		Kabupaten Bogor	PAD	10		
		Jumlah bibit aglonema yang difasilitasi	batang	500,00		Kabupaten Bogor	PAD	-		
		Jumlah bibit angrek yang difasilitasi	batang	500,00		Kabupaten Bogor	PAD	350		
		Jumlah benih padi yang diproduksi (prog prioritas bupati)	kg	376.800,00		Kabupaten Bogor	PAD	350		
		Jumlah bimtek penangkar benih	orang	100,00		Kabupaten Bogor	PAD	100		
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase prasarana pertanian yang dapat dipenuhi	%	17,55	15.711.177.287	Kabupaten Bogor	PAD	18,64	20.231.081.419	
	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah informasi pengembangan prasarana pertanian	dokumen	3,00	835.093.475	Kabupaten Bogor	PAD	3	750.000.000	
	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B	Jumlah Dokumen Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola	dokumen	1,00	316.369.500	Kabupaten Bogor	PAD	1	350.000.000	
		Jumlah pelaksanaan revisi perda LP2B no 7 tahun 2019	laporan			sinkronisasi KP2B Prov Jabar	Kabupaten Bogor	PAD	1	150.000.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	laporan	1,00	168.730.000	Kabupaten Bogor	PAD	1	250.000.000	
	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Jumlah Dokumen Actionplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan, dan Komoditas Pertanian	dokumen	1,00	199.993.975	Kabupaten Bogor	PAD	1	250.000.000	
	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Luas kawasan pertanian yang dimanfaatkan			150.000.000					
	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian yang terbangun	unit	35,00	14.876.083.812	Kabupaten Bogor	PAD	38	19.481.081.419	

NO	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	
				VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	unit	19,00	5.066.185.570	Kabupaten Bogor	PAD	-	11.211.789.221
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	unit	6,00	3.650.000.000	Kabupaten Bogor	PAD	15	-
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah Dam Parit yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	unit	3,00	863.470.849	Kabupaten Bogor	PAD	-	1.982.500.000
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	unit	1,00	73.000.000	Kabupaten Bogor	PAD	3	832.793.198
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	unit	5,00	5.223.427.393	Kabupaten Bogor	PAD	-	76.650.000
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase penanganan Dampak Perubahan Iklim terhadap pertanian	%	27,95	2.233.740.452	Kabupaten Bogor	PAD	41,93	2.413.721.535
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah cakupan luas lahan pengendalian dan penanganan bencana pertanian	ha	3.500,00	2.233.740.452	Kabupaten Bogor	PAD	15	2.413.721.535
	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (UPT Wil I)	Jumlah luas serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang dikendalikan	Ha	450,00	480.000.000	Kabupaten Bogor	PAD	500	550.000.000
		Jumlah gerakan pengendalian OPT dan sarana pendukungnya	Gerakan	7,00		Kabupaten Bogor	PAD	9	
		Jumlah lokasi diseminasi teknologi pengendalian OPT	Kelompok Tani	7,00		Kabupaten Bogor	PAD	9	
		Jumlah penerapan pengendalian OPT dan sarana pendukungnya	Kelompok Tani	7,00		Kabupaten Bogor	PAD	7	
		Jumlah jaring burung yang difasilitasi	unit	240,00		Kabupaten Bogor	PAD	240	

NO	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	
				VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (UPT Wil XII)	Jumlah luas serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang dikendalikan	Ha	500,00	596.297.057	Kabupaten Bogor	PAD	-	617.352.535
		Jumlah gerakan pengendalian OPT dan sarana pendukungnya	Gerakan	15,00		Kabupaten Bogor	PAD	15	
		Jumlah lokasi diseminasi teknologi pengendalian OPT	Kelompok Tani	15,00		Kabupaten Bogor	PAD	15	
		Jumlah penerapan pengendalian OPT dan sarana pendukungnya	Kelompok Tani	10,00		Kabupaten Bogor	PAD	11	
		Jumlah jaring burung yang difasilitasi	unit	300,00		Kabupaten Bogor	PAD	300	
	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	ha	20.000,00	1.067.471.895	Kabupaten Bogor	PAD	-	1.151.200.000
		Jumlah kajian mitigasi DPI	dokumen	1,00		Kabupaten Bogor	PAD	1	
	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan hortikultura dan perkebunan	laporan	1,00	89.971.500	Kabupaten Bogor	PAD	-	95.169.000
		Jumlah peserta rakor dan sosialisasi penanggulangan pasca bencana pertanian	orang	300,00		Kabupaten Bogor	PAD	350	
	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan pelayanan pertimbangan teknis izin usaha pertanian	%	28,49	2.829.999.854	Kabupaten Bogor	PAD	46,08	3.213.000.000
	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi pendampingan pelaku usaha dalam pengajuan izin usaha pertanian	pelaku usaha	249,00	2.829.999.854	Kabupaten Bogor	PAD	292	3.213.000.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2025				PRAKTIKAAN MAJU TAHUN 2021	
				VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Jumlah Dok Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian (dok sasaran pertanian, dok monografi, buku saku, dan statistik perkebunan)	dokumen	4,00	550.000.000	Kabupaten Bogor	PAD	-	575.000.000
	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	dokumen	1,00	1.330.000.000	Kabupaten Bogor	PAD	-	1.189.000.000
		Jumlah kelompok tani yang mengajukan registrasi kebun komoditas hortikultura	poktan/ pelaku usaha	16,00		Kabupaten Bogor	PAD	17	
		Jumlah pelaku usaha perkebunan	perusahaan	10,00		Kabupaten Bogor	PAD	10	
		Jumlah pelaku usaha tanaman pangan (beras ASN)	poktan	13,00		Kabupaten Bogor	PAD	15	
		Jumlah pameran	kali	2,00		Kabupaten Bogor	PAD	2	
		Jumlah pembinaan poktan kopi	poktan	10,00		Kabupaten Bogor	PAD	10	
		Jumlah sertifikasi komoditas organik	poktan	3,00		Kabupaten Bogor	PAD	3	
	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar dan Izin Usaha Pertanian (UPT Wil IV)	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	laporan	1,00	599.999.854	Kabupaten Bogor	PAD	3	949.000.000
		Jumlah pelaku usaha yang dibina dan diawasi penerapan izin usahanya	pelaku usaha	120,00		Kabupaten Bogor	PAD	35	
		Jumlah Penyelenggaraan Promosi/Pameran Komoditas Pertanian	kali	8,00		Kabupaten Bogor	PAD	-	
		Jumlah pemberdayaan keluarga miskin	KK	7,00		Kabupaten Bogor	PAD	120	
	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar dan Izin Usaha Pertanian (UPT Wil VII)	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	laporan	1,00	350.000.000	Kabupaten Bogor	PAD	10	500.000.000
		Jumlah Pelaku usaha yang dibina dan diawasi penerapan ijin usahanya	pelaku usaha	80,00		Kabupaten Bogor	PAD	20	

NO	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	
				VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Penyelenggaraan Promosi/Pameran Komoditas Pertanian	kali	8,00		Kabupaten Bogor	PAD	-	
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase peningkatan kompetensi SDM pertanian	%	1.98	8.073.340.492	Kabupaten Bogor	PAD	2.93	9.456.961.400
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase peningkatan kemampuan kelas kelompok tani berdasarkan skor penilaian	%	53.50	8.073.340.492	Kabupaten Bogor	PAD	55	9.456.961.400
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya	unit	13,00	3.045.087.425	Kabupaten Bogor	PAD	-	3.390.584.900
		Jumlah Penyuluh Pertanian Swadaya yang terfasilitasi dalam pelaksanaan tugas	orang	190,00		Kabupaten Bogor	PAD	190	
		Jumlah Fasilitasi rapat pertemuan 2 mingguan BPP	kali	286,00		Kabupaten Bogor	PAD	286	
		Jumlah penyuluh pertanian yang terukur kinerjanya dalam melaksanakan tugas	orang	190,00		Kabupaten Bogor	PAD	190	
		Jumlah penyuluh pertanian dan kelembagaan penyuluhan tingkat desa yang dinilai	paket	3,00		Kabupaten Bogor	PAD	3	
		Jumlah penyuluh pertanian swadaya yang disertifikasi	orang	25,00		Kabupaten Bogor	PAD	25	
		Jumlah peserta sosialisasi perbup penyelenggaraan penyuluhan tingkat desa/kelurahan	orang	100,00		Kabupaten Bogor	PAD	100	
		Jumlah peserta bimtek penyuluh pertanian	orang	30,00		Kabupaten Bogor	PAD	30	
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	kelompok tani	100,00	1.530.000.143	Kabupaten Bogor	PAD	-	2.380.000.000
		Jumlah penilaian petani milenial, gapoktan, posluhdes, dan petani berprestasi	paket	7,00		Kabupaten Bogor	PAD	7	
		Terfasilitasinya bibit untuk lomba tingkat provinsi	pohon/benih	1.050,00		Kabupaten Bogor	PAD	1	
		Terfasilitasinya terusunnya dokumentasi RDKK	dokumen	2.225,00		Kabupaten Bogor	PAD	1,05	
		Terfasilitasinya pendampingan lomba tingkat provinsi	Kategori	7,00		Kabupaten Bogor	PAD	2,3	

NO	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2026				PRAKTIKUM BAGI TAHUN 2026	
				VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Terfasilitasinya pembinaan lomba tingkat kabupaten	Kegiatan	21,00		Kabupaten Bogor	PAD	4	
		Terselenggaranya pelatihan bagi petani	Angkatan	10,00		Kabupaten Bogor	PAD	12	
		Terselenggaranya HKP Tingkat Provinsi	Kali	1,00		Kabupaten Bogor	PAD	10	
	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	unit	13,00	1.236.199.299	Kabupaten Bogor	PAD	1	1.942.401.500
		Jumlah Pemanfaatan dan Pemeliharaan Lahan Percontohan Dinas	paket	1,00		Kabupaten Bogor	PAD	-	
		Jumlah bangunan pada lahan AFS yang terpelihara	unit	1,00		Kabupaten Bogor	PAD	15	
		Jumlah Perjalanan Dinas Penyuluh/Koorluh yang terfasilitasi	HOK	650,00		Kabupaten Bogor	PAD	-	
		Jumlah Penerapan Metodologi Penyuluhan	Unit	40,00		Kabupaten Bogor	PAD	-	
	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	unit	15,00	759.999.775	Kabupaten Bogor	PAD	-	902.500.000
	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	orang	190,00	398.510.425	Kabupaten Bogor	PAD	-	405.658.000
		Jumlah peserta pelatihan spesifik lokalita	orang	357,00		Kabupaten Bogor	PAD	1	
		Jumlah peserta bimtek kepemimpinan kelembagaan petani	orang	30,00		Kabupaten Bogor	PAD	1	
	Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk	unit	5,00	180.075.850	Kabupaten Bogor	PAD	650	190.000.000
		Jumlah pelatihan penumbuhan dan pengembangan KEP	kegiatan	5,00		Kabupaten Bogor	PAD	40	
		Jumlah pelaksanaan pembinaan KEP	kegiatan	5,00		Kabupaten Bogor	PAD	-	
	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian	dokumen	1,00	923.467.575	Kabupaten Bogor	PAD	4	245.817.000
		Jumlah peningkatan kapasitas petani milenial	kegiatan	6,00		Kabupaten Bogor	PAD	-	

NO	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	
				VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	Point	74,55	49.298.603.858	Kabupaten Bogor	PAD	74,65	49.527.197.224
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja PD yang Berkualitas	%	100,00	418.358.968	Kabupaten Bogor	PAD	100	421.569.413
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	13,00	122.526.850	Kabupaten Bogor	PAD	13	128.653.250
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	1,00	27.571.550	Kabupaten Bogor	PAD	1	13.683.128
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen	2,00	15.601.950	Kabupaten Bogor	PAD	2	16.382.048
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dokumen	1,00	1.788.100	Kabupaten Bogor	PAD	1	1.877.847
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	dokumen	2,00	6.677.900	Kabupaten Bogor	PAD	2	7.011.900
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	14,00	172.655.118	Kabupaten Bogor	PAD	14	178.846.813
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	17,00	71.537.500	Kabupaten Bogor	PAD	17	75.114.428
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran perangkat daerah	%	98,21	37.895.762.426	Kabupaten Bogor	PAD	-	39.779.958.812
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	251,00	37.573.913.154	Kabupaten Bogor	PAD	251	39.452.608.812

NO	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	
				VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen ajuan bulanan	12,00	181.999.804	Kabupaten Bogor	PAD	12	185.000.000
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	dokumen	2,00	34.999.868	Kabupaten Bogor	PAD	2	37.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	1,00	3.749.950	Kabupaten Bogor	PAD	1	4.000.000
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	dokumen	1,00	2.749.900	Kabupaten Bogor	PAD	1	3.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan	12,00	94.999.950	Kabupaten Bogor	PAD	12	95.000.000
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	dokumen	1,00	3.349.800	Kabupaten Bogor	PAD	1	3.350.000
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Aset yang Tercatat sesuai dengan Ketentuan Pengelolaan Barang Milik Daerah	%	100,00	3.800.000	Kabupaten Bogor	PAD	100	4.000.000
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	2,00	3.800.000	Kabupaten Bogor	PAD	2	4.000.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Tertangani Layanan Kepegawaian Tepat Waktu	%	100,00	537.052.950	Kabupaten Bogor	PAD	100	493.050.000
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	unit	450,00	123.750.000	Kabupaten Bogor	PAD	450	122.850.000
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	paket	300,00	225.000.000	Kabupaten Bogor	PAD	300	120.000.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	
				VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	dokumen	2,00	32.400.000	Kabupaten Bogor	PAD	2	32.800.000
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	dokumen	2,00	8.710.000	Kabupaten Bogor	PAD	2	9.000.000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	350,00	14.500.000	Kabupaten Bogor	PAD	350	15.900.000
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	150,00	95.192.950	Kabupaten Bogor	PAD	200	140.000.000
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	5,00	37.500.000	Kabupaten Bogor	PAD	7	52.500.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Jasa Pelayanan Administrasi Umum	%	100,00	1.722.463.270	Kabupaten Bogor	PAD	100	1.788.159.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	1,00	100.919.025	Kabupaten Bogor	PAD	1	106.100.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	3,00	259.957.874	Kabupaten Bogor	PAD	3	262.000.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	2,00	18.962.925	Kabupaten Bogor	PAD	2	20.900.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	2,00	120.246.600	Kabupaten Bogor	PAD	2	126.609.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	2,00	56.000.000	Kabupaten Bogor	PAD	2	56.800.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2025				PRANIPATAN BANGUNAN TAHUN 2025	
				VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	1,00	27.120.000	Kabupaten Bogor	PAD	1	28.000.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	12,00	228.690.000	Kabupaten Bogor	PAD	12	232.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	2,00	853.970.000	Kabupaten Bogor	PAD	2	896.000.000
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	dokumen	1,00	31.500.000	Kabupaten Bogor	PAD	1	33.250.000
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	dokumen	1,00	25.096.846	Kabupaten Bogor	PAD	1	26.500.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana yang sesuai dengan Ketentuan	%	100,00	1.082.674.050	Kabupaten Bogor	PAD	100	1.251.810.000
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	unit	4,00	371.504.050	Kabupaten Bogor	PAD	5	439.560.000
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	5,00	197.500.000	Kabupaten Bogor	PAD	5	200.000.000
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	43,00	136.500.000	Kabupaten Bogor	PAD	33	114.000.000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang Disediakan	unit	32,00	377.170.000	Kabupaten Bogor	PAD	35	498.250.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100,00	2.297.369.487	Kabupaten Bogor	PAD	100	2.605.150.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	
				VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12,00	746.443.000	Kabupaten Bogor	PAD	12	785.150.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12,00	1.550.926.487	Kabupaten Bogor	PAD	12	1.820.000.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara Dengan Baik	%	100,00	5.341.122.707	Kabupaten Bogor	PAD	100	3.183.500.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	181,00	637.200.000	Kabupaten Bogor	PAD	186	699.500.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	20,00	2.139.994.107	Kabupaten Bogor	PAD	-	2.166.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	unit	296,00	284.606.000	Kabupaten Bogor	PAD	-	318.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Jasa Pelayanan Administrasi Umum	%	-	1.722.712.300	Kabupaten Bogor	PAD	100	1.788.159.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	1	101.030.000	Kabupaten Bogor	PAD	1	106.100.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	
				VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	3	260.000.000	Kabupaten Bogor	PAD	3	262.000.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	2	19.000.000	Kabupaten Bogor	PAD	2	20.900.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	2	120.580.300	Kabupaten Bogor	PAD	2	126.609.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	2	56.000.000	Kabupaten Bogor	PAD	2	56.800.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	dokumen	1	26.712.000	Kabupaten Bogor	PAD	1	28.000.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	12	228.690.000	Kabupaten Bogor	PAD	12	232.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	2	854.000.000	Kabupaten Bogor	PAD	2	896.000.000
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	dokumen	1	31.500.000	Kabupaten Bogor	PAD	1	33.250.000
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	dokumen	1	25.200.000	Kabupaten Bogor	PAD	1	26.500.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terpenuhiya Kebutuhan Sarana dan Prasarana yang sesuai dengan Ketentuan	%	-	1.082.690.000	Kabupaten Bogor	PAD	100	3.183.500.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	
				VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	unit	4	371.520.000	Kabupaten Bogor	PAD	186	699.500.000
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	5	197.500.000	Kabupaten Bogor	PAD	-	2.166.000.000
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	jenis	43	136.500.000	Kabupaten Bogor	PAD	-	318.000.000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	32	377.170.000	Kabupaten Bogor	PAD	35	498.250.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	-	2.547.762.750	Kabupaten Bogor	PAD	100	2.605.150.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	747.762.750	Kabupaten Bogor	PAD	12	785.150.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	1.800.000.000	Kabupaten Bogor	PAD	12	1.820.000.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara Dengan Baik	%	-	1.216.000.000	Kabupaten Bogor	PAD	100	3.183.500.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	181	692.000.000	Kabupaten Bogor	PAD	186	699.500.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	20	214.000.000	Kabupaten Bogor	PAD	-	2.166.000.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	
				VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	unit	296	310.000.000	Kabupaten Bogor	PAD	-	318.000.000
TOTAL (Rp)					99.083.005.016				132.599.463.166